

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan perlunya pemantauan terhadap perkembangan dan proses pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas agar lebih efektif, efisien, proporsional, dan berkesinambungan.

Pemantauan merupakan suatu pengamatan dan/atau pencermatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala untuk menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program/kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan merumuskan tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan dan evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan oleh setiap penanggung jawab kegiatan, diharapkan hasilnya dapat berguna untuk menentukan tingkat pencapaian dan optimalisasi kapasitas program/kegiatan agar terarah pada pencapaian sasaran sesuai dengan tujuannya. Selain itu, hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan laporan evaluasi kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan perencanaan dalam keberlangsungan program/kegiatan.

Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas tersebut dijelaskan antara lain bahwa setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) dan Unit Kerja Eselon II (UKE II) sebagai penanggung jawab kegiatan dan pelaksana kegiatan serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan (*self monitoring*). Hasil pemantauan tersebut disampaikan kepada Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana untuk disusun sebagai Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas.

Laporan Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas Triwulan IV Tahun 2014 akan menggambarkan hasil realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas selama 12 (dua belas) bulan, dan laporan ini merupakan hasil akumulasi realisasi Bulan Januari sampai dengan Desember 2014.

B. TUJUAN

Tujuan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, baik fisik maupun keuangan dalam rangka menjamin konsistensi antara pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan, baik terhadap tingkat perkembangan pelaksanaannya maupun manfaat yang ditargetkan dan hambatan atau kendala yang terjadi untuk diambil tindakan korektif sedini mungkin.
3. Untuk mendukung usaha penyempurnaan perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai secara efisien dan efektif.

C. DASAR DAN METODOLOGI PEMANTAUAN

Pemantauan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian PPN/Bappenas dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Hibah
3. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PER.05/MEN.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Nomor 02/M.PPN/06/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Di Kementerian Negara PPN/Bappenas
5. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian PPN/Bappenas
8. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 Tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.36/M.PPN/HK/04/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 103/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM, PPK, dan BPA SATKER .
9. Petunjuk Pelaksanaan Sesmen PPN/Sestama No. 1/Juklak/Sesmen/02/2014 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas
10. Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor: DIPA-055.01.1.017312/2014 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan DIPA-055.01.1.966009/2014 untuk Satker Pengelola Hibah MCC.

Laporan hasil pemantauan ini disusun sesuai dengan ketentuan dasar tersebut di atas dengan melakukan analisis deskriptif berdasarkan tabulasi/hasil pengolahan data realisasi penyerapan anggaran yang disampaikan oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Biro Umum berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya dijelaskan mengenai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan proses pencairan dana.

BAB II

GAMBARAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBN)

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010-2014

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2010-2014. Visi tersebut adalah untuk *“mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”*.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

B. TUJUAN DAN SASARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kementerian PPN/Bappenas dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai sebagaimana dalam Tabel 1 berikut:

TABEL 1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR TAHUN 2014
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (REVISI)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas	Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antar-waktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya	1. % kesesuaian muatan antara RPJMN 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025
			2. % kesesuaian muatan antara RKP 2015 dengan RPJMN 2015-2019
			3. % kesesuaian muatan antara Renja K/L 2015 dengan RKP 2015
			4. % kesesuaian rancangan RKA K/L 2015 dengan RKP 2015
			5. % kesesuaian RKPD Propinsi dengan RKP 2014
			6. % K/L/P yang memiliki SDM Perencana yang berkualitas
	Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	% sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	
	Tingkat kepercayaan <i>stakeholders</i> terhadap produk perencanaan	1. Pendapat <i>stakeholder</i> tentang proses penyusunan RKP 2015	
		2. Pendapat <i>stakeholders</i> tentang proses penyusunan RPJMN 2015-2019	
2.	Terlaksananya koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya sesuai peran Kementerian PPN/Bappenas	Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	% dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres, Menko)
			% K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus
3.	Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. Nilai RB K/L
			2. Opini BPK
			3. Nilai Evaluasi AKIP

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka ditetapkan target indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang akan dicapai melalui pelaksanaan program di Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

TABEL 2
PENETAPAN KINERJA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya perencanaan yang terintegrasi, sinkron dan sinergis antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dengan penganggarannya	1. % kesesuaian muatan antara RPJMN 2015-2019 dengan RPJPN 2005-2025	96%	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	Unit Kerja Eselon I dan II di Kedepuitan
	2. % kesesuaian muatan antara RKP 2015 dengan RPJMN 2015-2019	97%		
	3. % kesesuaian muatan antara Renja K/L 2015 dengan RKP 2015	89%		
	4. % kesesuaian rancangan RKA K/L 2015 dengan RKP 2015	82%		
	5. % kesesuaian RKPDP Propinsi dengan RKP 2014	30%		
	6. % K/L/P yang memiliki SDM Perencana yang berkualitas	35%		
Terlaksananya program-program pembangunan sesuai dengan rencana	% sasaran Prioritas Nasional yang telah sesuai dengan rencana	86%		
Tingkat kepercayaan stakeholders terhadap produk perencanaan	1. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RKP 2015	Baik		Unit Kerja Eselon I dan II di Setmen PPN/Settama Bappenas
	2. Pendapat stakeholders tentang proses penyusunan RPJMN 2015-2019	Baik		
Meningkatnya peran Kementerian PPN/Bappenas terkait koordinasi kebijakan pembangunan nasional lainnya	1. % dokumen perencanaan atau pelaporan lainnya yang disetujui atau disepakati oleh pemberi tugas (Presiden, Wapres, Menko)	100%		Unit Kerja Eselon I dan II di Kedepuitan
	2. % K/L/P yang telah menindaklanjuti program-program penugasan khusus	82%		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas	1. Nilai RB K/L	85	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PPN/Bappenas	1. Unit Kerja Eselon I dan II di Setmen PPN/Settama Bappenas
	2. Opini BPK	WTP		
	3. Nilai Evaluasi AKIP	A		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	PELAKSANA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PPN/Bappenas 3. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PPN/Bappenas	2. Unit Kerja Eselon I dan II di Inspektorat Utama Bappenas 3. Unit Kerja Eselon I dan II di Kedeputian

C. STRUKTUR PROGRAM DAN PENGELOLAAN ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

1. Struktur Program Kementerian PPN/Bappenas

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2010-2014, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Perencanaan Pembangunan Nasional.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan.

b. Program Generik

- 1) Program Generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
- 2) Program Generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 3) Program Generik 3: Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Dari berbagai program tersebut telah dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan baik yang mendukung tugas-tugas utama maupun tugas pendukung dalam melaksanakan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas.

2. Struktur Pengelolaan Anggaran Kementerian PPN/Bappenas

Struktur pengelolaan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja (Satker), yaitu 1 Satker Utama pada tingkat Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Sesmen PPN/Sestama Bappenas), 1 Satker Pengelolaan Hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC) dan 33 Satker pelaksanaan dana dekonsentrasi di setiap provinsi. Satuan Kerja utama Setmen PPN/Settama Bappenas tersebut merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yang dibantu oleh satu bendaharawan pengeluaran anggaran dan satu Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), serta beberapa orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), baik PPK Program maupun PPK yang berada di setiap Unit Kerja Eselon I (UKE I) atau Kedeputusan. Selain itu, pada setiap PPK dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Pengadaan.

Susunan pengelola anggaran di Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 103/M.PPN/HK/12/2013 Tanggal 30 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA Satker) Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam proses pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran, pengelola anggaran dan unit kerja pelaksana kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012, tentang Pedoman Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran di Kementerian PPN/Bappenas serta Petunjuk Pelaksanaan No. 2/Juklak/Sesmen/03/2014.

Dengan struktur pengelolaan anggaran tersebut diharapkan pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan, dan pelaporan realisasi penyerapan anggaran akan menjadi suatu sinergi yang positif sehingga ada sinkronisasi antar struktur program dan kegiatan dengan struktur organisasinya.

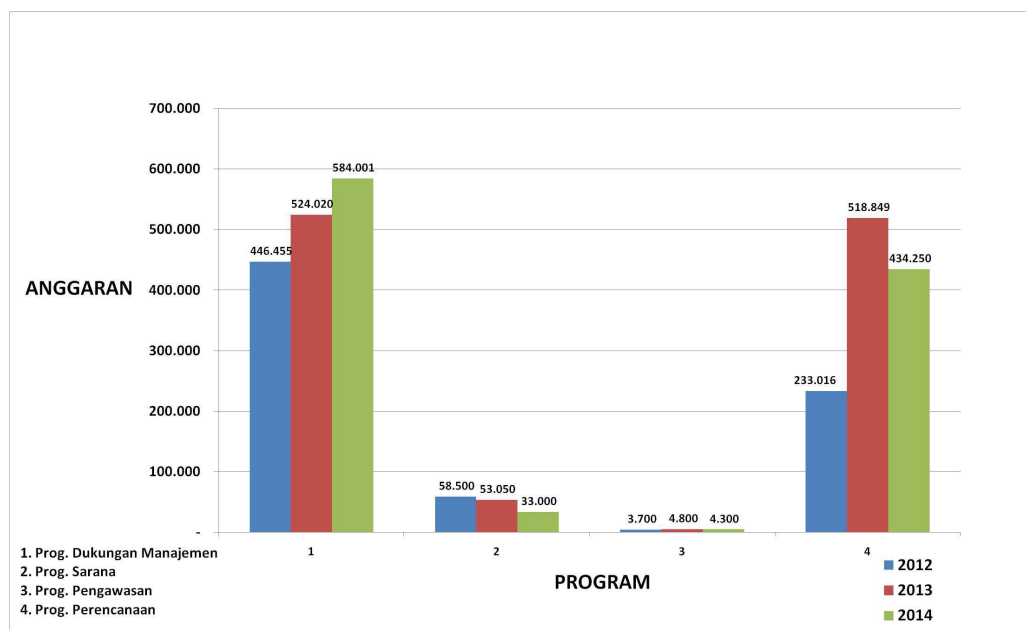
Seperti telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 terdiri dari 4 (empat) program, yaitu:

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dikelola oleh 12 (dua belas) PPK Kedeputan di lingkungan UKE I (Kedeputan), dan oleh 33 Satker di 33 provinsi.
- 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang dikelola oleh 4 (empat) PPK di Sekretariat Menteri PPN/Sekretariat Utama Bappenas (Setmen PPN/Settama Bappenas).
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas, yang dikelola oleh 1 (satu) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas.
- 4) Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, yang dikelola oleh 1 (satu) orang PPK di Inspektorat Utama.

D. ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas, pada tahun anggaran 2014 Kementerian PPN/Bappenas mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.055.551.879.000,- yang terdiri dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 533.235.005.400,-, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp. 340.702.435.600,- dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp. 181.614.438.000,-. Berikut pada Gambar 1 terlihat perbandingan alokasi dana tahun 2012-2014.

GAMBAR 1
ALOKASI DANA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS 2012-2014



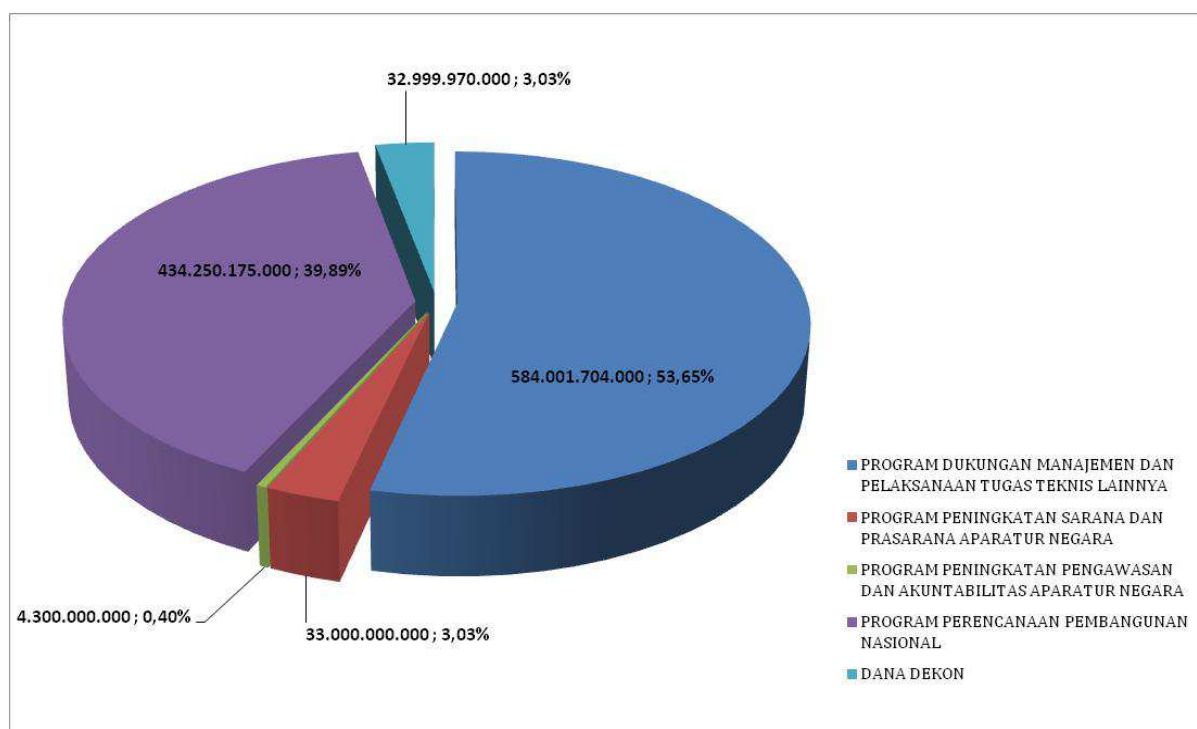
Anggaran Kementerian PPN/Bappenas dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis dan penetapan kinerja tahun 2014, yang terdiri dari 2 Satker di Kementerian PPN/Bappenas yang dikelola oleh 18 (delapan belas) PPK yang tersebar di masing-masing program, dan 33 Satker di 33 provinsi. Rincian alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun anggaran 2014 menurut program terdapat pada Tabel 3 dan porsi anggaran masing-masing program dapat dilihat pada Gambar 2.

TABEL 3
ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PROGRAM	ALOKASI DANA (dalam ribu)			
		RM	PLN	HLN	JUMLAH
SATKER 017312					
I	Perencanaan Pembangunan Nasional	187.956.727.000	67.777.100.000	178.516.348.000	434.250.175.000
II	Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya	307.978.278	272.925.335.600	3.098.090.000	584.001.704.000
III	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappenas	33.000.000.000	-	-	33.000.000.000
IV	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4.300.000.000	-	-	4.300.000.000
JUMLAH		523.235.005.400	340.702.435.600	61.614.438.000	925.551.879.000
SATKER 966009					
V	Perencanaan Pembangunan Nasional	10.000.000.000		120.000.000.000	130.000.000.000

NO	PROGRAM	ALOKASI DANA (dalam ribu)			
		RM	PLN	HLN	JUMLAH
SATKER DANA DEKONSENTRASI (33 PROVINSI)					
VI	Perencanaan Pembangunan Nasional	32.999.970.000	-	-	32.999.970.000
TOTAL		566.234.975.400	340.702.435.600	181.614.438.000	1.088.551.849.000

**GAMBAR 2
PROPORSI ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2014**



Dari Tabel 3 dan Gambar 2 tersebut dapat diketahui bahwa Program Perencanaan Pembangunan Nasional (termasuk dana yang dikelola oleh Pengelola Hibah MCC dan satker pengelola dana dekonsentrasi di seluruh provinsi) merupakan program yang mempunyai alokasi dana terbesar diantara program-program yang lain, kemudian disusul Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya yang mengelola gaji, tunjangan serta kegiatan strategis yang melibatkan hampir semua unit kerja eselon I dan II.

Pada tahun 2014, khusus untuk dana PHLN di Kementerian PPN/Bappenas terdapat 4 (empat) PLN dan 15 (lima belas) HLN, dengan nilai total sebesar Rp. 522.316.873.600,- (termasuk dana rupiah pendamping untuk PHRDPIII dan PHRDPIV), sebagaimana terdapat pada Tabel 4 berikut:

TABEL 4
ALOKASI ANGGARAN PHLN KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PROGRAM	PHLN		
		PLN	HLN	JUMLAH
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA		272.925.335.600	3.098.090.000	276.023.425.600
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS II	-	3.098.090.000	3.098.090.000
	e Biro SDM	-	3.098.090.000	3.098.090.000
2	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS IV	272.925.335.600	-	272.925.335.600
	a Pusbindiklatren	272.925.335.600	-	272.925.335.600
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		67.777.100.000	178.516.348.000	246.293.448.000
1	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	-	15.944.381.000	15.944.381.000
	b Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	-	8.577.558.000	8.577.558.000
	d Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	2.737.829.000	2.737.829.000
	e Direktorat Agama Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	-	4.628.994.000	4.628.994.000
2	PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	-	4.113.449.000	4.113.449.000
	b Direktorat Politik dan Komunikasi	-	3.923.449.000	3.923.449.000
	e Direktorat Analisa Peraturan Perundang-undangan	-	190.000.000	190.000.000
3	PPK DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM	-	4.508.830.000	4.508.830.000
	b Direktorat Penanggulangan Kemiskinan	-	4.508.830.000	4.508.830.000
4	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	-	10.876.078.000	10.876.078.000
	f Direktorat Lingkungan Hidup	-	10.876.078.000	10.876.078.000
5	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	-	15.429.926.000	15.429.926.000
	b Direktorat Transportasi	-	2.868.936.000	2.868.936.000
	c Direktorat Permukiman dan Perumahan	-	12.560.990.000	12.560.990.000
6	PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH	3.735.000.000	3.008.988.000	6.743.988.000
	b Direktorat Pengembangan Wilayah	3.735.000.000	-	3.735.000.000
	c Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	-	1.023.401.000	1.023.401.000
	d Direktorat Otonomi Daerah	-	1.985.587.000	1.985.587.000
7	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	-	4.634.696.000	4.634.696.000
	d Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral	-	1.029.750.000	1.029.750.000
	e Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional	-	3.604.946.000	3.604.946.000
8	PPK PROGRAM SUMBER DAYA AIR TERPADU	17.488.100.000	-	17.488.100.000
9	PPK SEKRETARIAT INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM	46.554.000.000	-	46.554.000.000
10	PPK PENGELOLAAN HIBAH MCC SATKER 966009)	-	120.000.000.000	120.000.000.000
JUMLAH		340.702.435.600	181.614.438.000	522.316.873.600

1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun anggaran 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 434.250.175.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 187.956.727.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 246.293.448.000,-.

Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/penganggarnya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/fungsi pemerintahan.
- 2) Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.
- 3) Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.
- 4) Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

Khusus untuk penyelenggaraan Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah bertujuan untuk (1) memperkuat koordinasi perencanaan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional dan (2) memperkuat koordinasi perencanaan prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional.

Pengelolaan anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut terbagi menjadi 3 Satker yang terdiri dari:

- 1) Satker 017312 yang dikelola oleh 11 (sebelas) PPK yang berada di UKE I Kedepatian (sebagaimana terdapat pada Tabel 5).
- 2) Satker 966009 yang dikelola oleh 1 (satu) PPK Pengelola Hibah MCC (sebagaimana terdapat pada Tabel 5).
- 3) Satker Dana Dekonsentrasi (33 Satker) di 33 provinsi (sebagaimana terdapat pada Tabel 6).

TABEL 5
ALOKASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN				TOTAL
		RM	PHLN		JUMLAH	
			PLN	HLN		
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		187.956.727.000	67.777.100.000	178.516.348.000	246.293.448.000	434.250.175.000
1	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	16.671.612.000	-	15.944.381.000	15.944.381.000	32.615.993.000
2	PPK DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN	13.214.136.000	-	4.113.449.000	4.113.449.000	17.327.585.000
3	PPK DEPUTI BIDANG KEMISKINAN, KETENAGAKERJAAN, DAN UKM	19.200.950.000	-	4.508.830.000	4.508.830.000	23.709.780.000
4	PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI	12.995.300.000	-	-	-	12.995.300.000
5	PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	17.115.200.000	-	10.876.078.000	10.876.078.000	27.991.278.000
6	PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA	14.239.940.000	-	15.429.926.000	15.429.926.000	29.669.866.000
7	PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH	23.562.012.000	3.735.000.000	3.008.988.000	6.743.988.000	30.306.000.000
8	PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN	14.535.800.000	-	4.634.696.000	4.634.696.000	19.170.496.000
9	PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN	14.045.800.000	-	-	-	14.045.800.000
10	PPK PROGRAM SUMBER DAYA AIR TERPADU	5.171.990.000	17.488.100.000	-	17.488.100.000	22.660.090.000
11	PPK SEKRETARIAT INFRASTRUCTURE REFORM SECTOR DEVELOPMENT PROGRAM	7.828.567.000	46.554.000.000	-	46.554.000.000	54.382.567.000
12	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG	19.375.420.000	-	-	-	19.375.420.000
13	PPK PENGELOLAAN HIBAH MCC SATKER (966009)	10.000.000.000	-	120.000.000.000	120.000.000.000	130.000.000.000

TABEL 6
ALOKASI DANA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TAHUN 2014

NO	BAPPEDA	ALOKASI
1	010025 -Bappeda Provinsi DKI Jakarta	799.290.000
2	020060 - Bappeda Provinsi Jawa Barat	838.290.000
3	030060 - Bappeda Provinsi Jawa Tengah	915.690.000
4	040069 - Bappeda Provinsi DIY	920.490.000
5	050060 - Bappeda Provinsi Jawa Timur	943.290.000
6	060004 - Bappeda Provinsi Aceh	1.045.290.000
7	070060 - Bappeda Provinsi Sumatera Utara	1.006.890.000
8	080019 - Bappeda Provinsi Sumatera Barat	958.890.000
9	090020 - Bappeda Provinsi Riau	962.490.000
10	100086 - Bappeda Provinsi Jambi	931.290.000
11	110060 - Bappeda Provinsi Sumatera Selatan	920.490.000
12	120022 - Bappeda Provinsi Lampung	882.090.000
13	130019 - Bappeda Provinsi Kalimantan Barat	949.290.000
14	140018 - Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	960.690.000
15	150060 - Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan	961.290.000
16	160019 - Bappeda Provinsi Kalimantan Timur	1.006.290.000
17	170021 - Bappeda Provinsi Sulawesi Utara	1.079.490.000
18	180060 - Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	1.080.090.000
19	190060 - Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	1.008.090.000
20	200019 - Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara	1.027.890.000
21	210019 - Bappeda Provinsi Maluku	1.190.490.000
22	220060 - Bappeda Provinsi Bali	976.290.000
23	230020 - Bappeda Provinsi NTB	974.490.000
24	240026 - Bappeda Provinsi NTT	1.078.290.000
25	250060 - Bappeda Provinsi Papua	1.252.890.000
26	260070 - Bappeda Provinsi Bengkulu	940.290.000
27	280016 - Bappeda Provinsi Maluku Utara	1.167.090.000
28	290009 - Bappeda Provinsi Banten	823.290.000
29	300092 - Bappeda Provinsi Bangka Belitung	913.290.000
30	310060 - Bappeda Provinsi Gorontalo	1.063.890.000
31	320099 - Bappeda Provinsi Kepulauan Riau	955.290.000
32	330096 - Bappeda Provinsi Papua Barat	1.400.490.000
33	340030 - Bappeda Provinsi Sulawesi Barat	1.066.290.000
TOTAL		32.999.970.000

Alokasi dana dekonsentrasi tahun 2014 sebesar Rp. 32.999.970.000,- dengan sasaran penyelenggaraan dekonsentrasi penguatan sinergi pusat dan daerah di 33 provinsi dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Perkuatan Koordinasi

Melaksanakan peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yaitu:

- a) Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
- b) Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium di Indonesia.
- c) Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- d) Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi.
- e) Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia dengan fokus pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan *Pro Poor Planning And Budgeting Monitoring* (P3BM).
- f) Koordinasi dan Pelaporan Pemantauan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP) Dan Urusan Bersama.

2. Fasilitasi Perkuatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Musrenbangnas

Fasilitasi perkuatan koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas muasyawarah perencanaan pembangunan nasional (Musrenbangnas) dan dokumen perencanaan dengan fokus pada:

- a) Koordinasi isu, program, dan kegiatan strategis masing-masing provinsi yang akan dibahas pada forum Musyawarah Pembangunan Nasional untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah yang dapat mencerminkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- b) Koordinasi penilaian dan penghargaan terhadap dokumen perencanaan daerah.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah untuk meningkatkan efektifitas penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2014 program ini mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 584.001.704.000,-. Alokasi ini terdiri dari dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 307.978.278.400,- dan dana PHLN sebesar Rp. 276.023.425.600,- yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.
- 2) Penyempurnaan ketatalaksanaan.
- 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.
- 4) Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif lembaga (*brand image building*).
- 5) Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.
- 6) Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.
- 7) Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan daerah.

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 4 (empat) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci alokasi anggaran tahun 2014 pada masing-masing PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (PPK DM) dapat dilihat pada Tabel 7.

TABEL 7
ALOKASI ANGGARAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
MENURUT PPK TAHUN ANGGARAN 2014

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN				TOTAL
		RM	PHLN			
			PLN	HLN	JUMLAH	
	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	307.978.278.400	272.925.335.600	3.098.090.000	276.023.425.600	584.001.704.000
1	PPK DM I	40.161.847.000	-	-	-	40.161.847.000
2	PPK DM III	25.018.830.000	-	3.098.090.000	3.098.090.000	28.116.920.000
3	PPK DM III	188.038.351.000	-	-	-	188.038.351.000
4	PPK DM IV	54.759.250.400	272.925.335.600	-	272.925.335.600	327.684.586.000

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah meningkatnya akses sarana dan prasarana, penguasaan data/informasi dan teknologi informasi serta pemanfaatannya dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan nasional. Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 33.000.000.000,-. Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Bappenas yang dilaksanakan oleh Biro Umum. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran.
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum Dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelayanan.

4. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas adalah meningkatnya efektifitas sistem pengawasan dan audit serta sistem akuntabilitas kinerja dalam mewujudkan aparatur Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan bebas Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Untuk mendukung pencapaian sasaran program tersebut, pada tahun 2014 program ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.300.000.000,-.

Anggaran program ini dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara yang berada di bawah pembinaan Inspektur Utama dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada UKE I dan II di Inspektorat Utama, antara lain:

- 1) Monitoring/Pengawasan Pelaksanaan.
- 2) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan.
- 3) Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi.
- 4) Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem Dan Prosedur Informasi Pengawasan.
- 5) Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga.
- 6) Peningkatan Intensitas dan Kualitas Pelaksanaan Pengawasan Dan Audit Internal Eksternal dan Pengawasan Internal.

E. PERUBAHAN (REVISI) DIPA TAHUN 2014

Sampai dengan akhir semester I tahun 2014, Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan perubahan/revisi DIPA, diantaranya

1. Revisi tanggal 8 Februari 2014. Revisi ini dilakukan untuk realokasi antar akun dalam 1 (satu) kegiatan.
2. Revisi tanggal 29 April 2014. Revisi ini dilakukan untuk realokasi beberapa anggaran pada unit kerja, antara lain :
 - a. Penambahan pagu anggaran hibah pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat menjadi Rp. 4.843.417.000,-,
 - b. Penambahan pagu anggaran hibah pada Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Sebesar Rp. 3.350.000.000,-
 - c. Penambahan pagu anggaran hibah pada Direktorat Lingkungan Hidup menjadi Rp. 7.884.965.000,-
 - d. Penambahan pagu anggaran hibah pada Direktorat Permukiman dan Perumahan menjadi Rp. 12.560.990.000,-
3. Revisi tanggal 19 Juni 2014. Revisi yang dilakukan karena ada penghematan anggaran berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2014.
4. Revisi tanggal 11 Juli 2014. Revisi ini dilakukan untuk realokasi beberapa anggaran pada unit kerja, antara lain :
 - a. Perubahan pagu anggaran pada PPK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (Biro Umum) menjadi Rp. 188.038.351.000,-,
 - b. Perubahan pagu anggaran pada PPK Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Bappenas (Biro Umum) menjadi Rp. 33.000.000.000,-,
 - c. Perubahan pagu anggaran pada PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan menjadi Rp. 24.515.029.000,-,
 - d. Perubahan pagu anggaran pada PPK Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan menjadi Rp. 13.214.136.000,-,
 - e. Perubahan pagu anggaran pada PPK Deputi Bidang Ekonomi menjadi Rp. 12.995.300.000,-,
 - f. Perubahan pagu anggaran pada PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menjadi Rp. 25.000.165.000,-,

- g. Perubahan pagu anggaran pada PPK Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menjadi Rp. 26.800.930.000,-,
 - h. Perubahan pagu anggaran pada PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah menjadi Rp. 33.806.912.000,-,
 - i. Perubahan pagu anggaran pada PPK Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menjadi Rp. 15.750.400.000,-,
 - j. Perubahan pagu anggaran pada PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan menjadi Rp. 14.045.800.000,-,
 - k. Perubahan pagu anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Lintas Bidang menjadi Rp. 19.375.420.000,-,
5. Revisi tanggal 6 Agustus 2014. Revisi ini dilakukan untuk realokasi anggaran perjalanan dinas dan konsinyering.
6. Revisi tanggal 18 November 2014. Revisi ini dilakukan untuk realokasi beberapa anggaran pada unit kerja, antara lain :
- a. Perubahan pagu PLN anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya IV (Pusbindiklatren) menjadi Rp. 272.925.335.600,-
 - b. Perubahan pagu HLN anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Direktorat Analisa Peraturan Perundang-Undangan) menjadi Rp. 190.000.000,-
 - c. Perubahan pagu HLN anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Direktorat Penanggulangan Kemiskinan) menjadi Rp. 4.508.830.000,-
 - d. Perubahan pagu HLN anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Direktorat Transportasi) menjadi Rp. 2.868.936.000,-
 - e. Perubahan pagu HLN anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal) menjadi Rp. 1.023.401.000,-
 - f. Perubahan pagu HLN anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Direktorat Otonomi Daerah) menjadi Rp. 1.985.587.000,-
 - g. Perubahan pagu HLN anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional) menjadi Rp. 2.299.900.000,-

7. Revisi tanggal 12 Desember 2014. Revisi ini dilakukan untuk realokasi beberapa anggaran pada unit kerja, antara lain :
- a. Perubahan pagu HLN anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Direktorat Politik dan Komunikasi) menjadi Rp. 3.923.449.000,-
 - b. Perubahan pagu HLN anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Direktorat Lingkungan Hidup) menjadi Rp. 10.876.078.000,-
 - c. Perubahan pagu HLN anggaran pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Direktorat Kerjasama Pembangunan Internasional) menjadi Rp. 3.604.946.000,-

BAB III
REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2014

Sebagaimana dijelaskan di atas alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2014 secara keseluruhan sebesar Rp. 1.088.551.849.000,- yang terdiri dana rupiah murni (RM) sebesar Rp. 566.234.975.000,-, pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp. 340.702.435.600,- dan hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp. 181.614.438.000,-. Realisasi penyerapan anggaran (diluar pelaksanaan dana dekonsentrasi) sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 899.947.954.410,- (85,26%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 448.826.506.072,- (84,17%), dana PHLN sebesar Rp. 451.121.448.338,- (86,37%). Sedangkan alokasi anggaran kegiatan Dekonsentrasi tahun 2014 sebesar Rp. 32.299.970.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan IV (akhir Desember) tahun 2014 yang dilaksanakan dari masing-masing program secara rinci sebagaimana terdapat pada Tabel 8.

TABEL 8
REALISASI ANGGARAN SATKER KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRAM	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN									
	RM	%	PHLN						TOTAL	%
			PLN	%	HLN	%	JUMLAH	%		
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	249.473.333.977	81,00	236.896.830.976	86,80	3.098.090.000	100	239.994.920.976	86,95	489.468.254.953	83,81
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPPENAS	31.446.774.834	95,29	-	-	-	-	-	-	31.446.774.834	95,29
PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR	3.929.931.932	91,39	-	-	-	-	-	-	3.929.931.932	91,39
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	163.976.465.329	87,24	41.065.399.680	60,59	166.022.181.241	93,00	207.087.580.921	84,08	371.064.046.250	85,45
JUMLAH	448.826.506.072	84,17	277.962.230.656	81,59	169.120.271.241	93,12	451.121.448.338	86,37	899.947.954.410	85,26

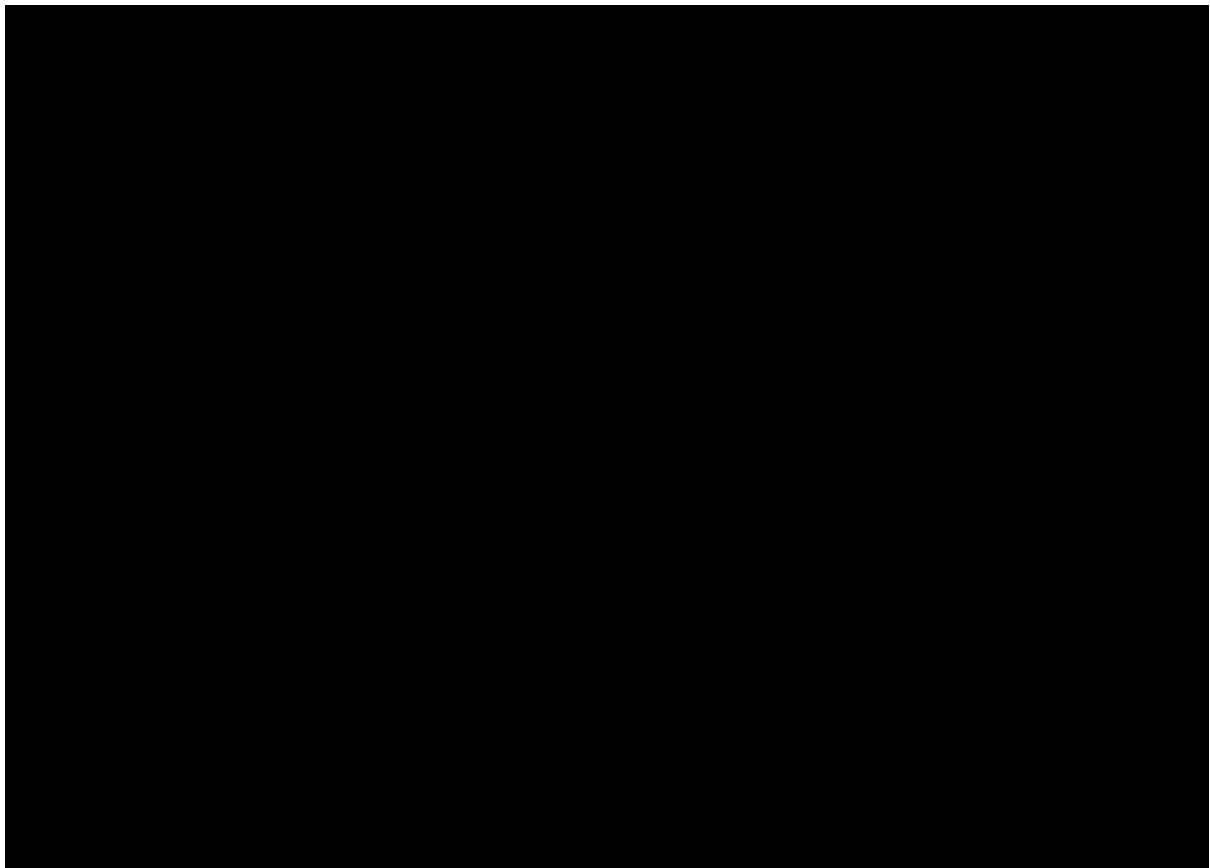
Secara rinci realisasi penyerapan anggaran tahun 2014 dari masing-masing program dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Perencanaan Pembangunan Nasional

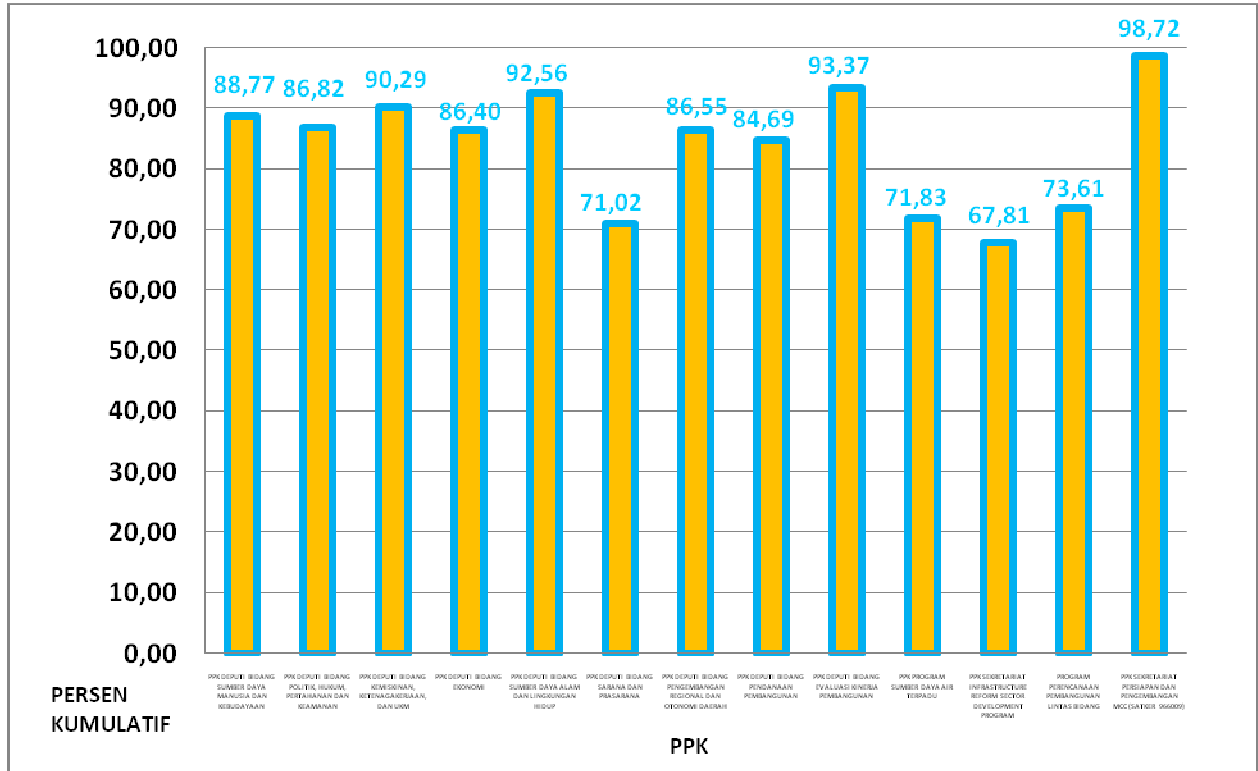
Alokasi anggaran Program Perencanaan Pembangunan Nasional untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2014 sebesar Rp. 434.250.175.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 187.956.727.000,-, dana PHLN sebesar Rp. 246.293.448.000,-. Sampai dengan bulan Desember 2014, realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp 371.064.046.250,- (85,45%).

Anggaran program ini dikelola oleh 13 (tiga belas) PPK yang berada di UKE I dengan rincianrealisasi penyerapan anggaran dan komposisinya sebagaimana terdapat pada Tabel 9 dan Gambar 3, serta penjelasannya sebagai berikut:

TABEL 9
REALISASI ANGGARAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(NON DANA DEKONSENTRASI)
TRIWULAN IV TAHUN 2014



GAMBAR 3
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
MENURUT PPK TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2014

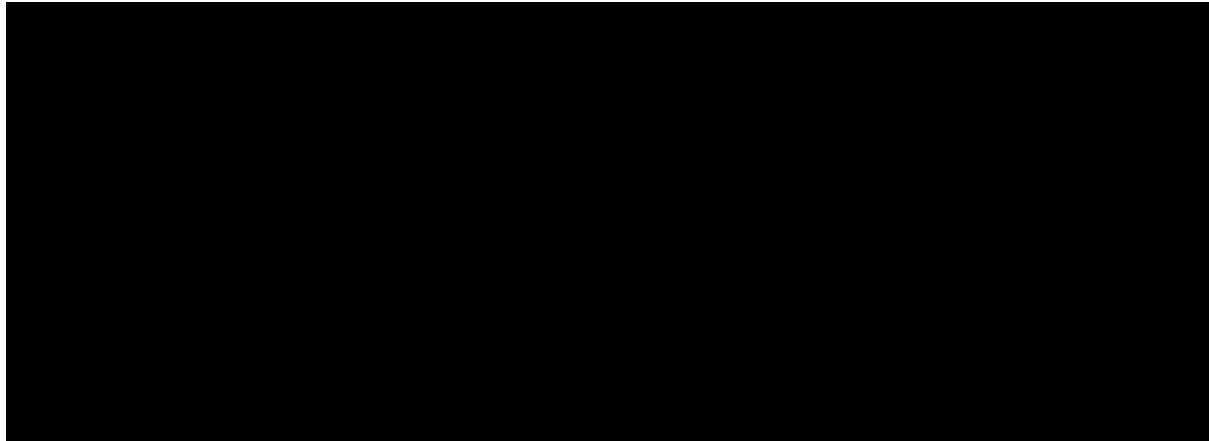


Realisasi penyerapan tertinggi PPK sampai dengan semester IV tahun 2014 adalah PPK *Millennium Corporation Challenges* (MCC) yaitu 98,72%, disusul oleh PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan 93,37%. Sedangkan penyerapan terendah adalah PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program* (IRSDP) 60,72%.

1) PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 32.615.993.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 16.671.612.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 15.944.381.000,-. Sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2014, realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 28.953.591.237,- (88,77%) sebagaimana terdapat dalam Tabel 10.

TABEL 10
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
TRIWULAN IV TAHUN 2014



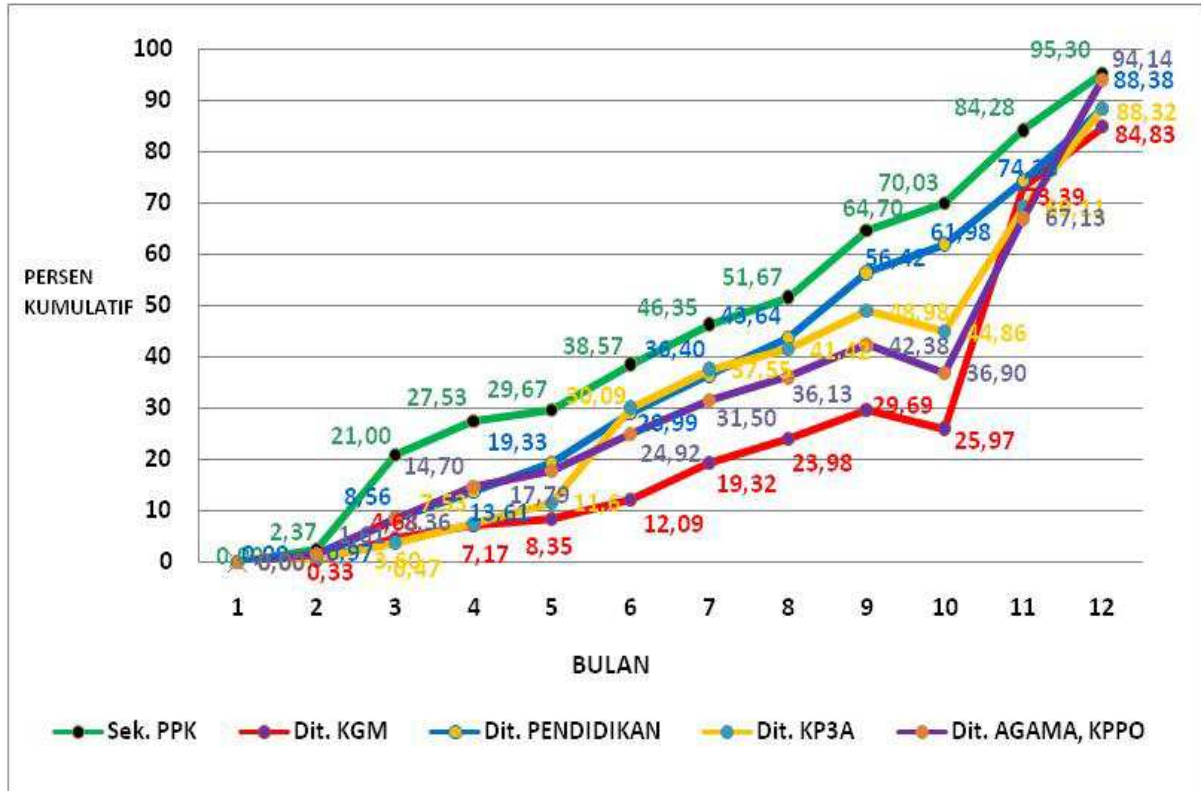
Dana HLN pada Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan dipergunakan untuk kegiatan: 1) Kerjasama Pemerintah RI-UNDP dalam MDGs Roadmap: *Support to Accelaration of MDGs Achievmnt in Indonesia 2013-2015*, pada Direktorat Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; 2) *UNPFA Country Programme Eight 2011-2015 Program Cooperative Between The GOI-UNFPA* pada Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 3) Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama RI-Unicef 2011-2015 dan Koordinasi Pengelolaan HibahJapan Fund for Poverty Reduction :*Assistance for Rice Fortification For the Poor* (Hibah JFPR) sebesar Rp. 4.843.417.000,- pada Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Direncanakan akan selesai pada akhir tahun ini, hibah JFPR bertujuan untuk mencegah dan mengurangi prevalensi anemia gizi besi pada penduduk miskin di Indonesia.

Selain hibah terencana, ada juga hibah langsung yang tidak masuk DIPA, yaitu *Country Programme Action Plan (CPAP) 2012-2015 Government of Indonesia - UNICEF Programme of Cooperation*. Dengan masa laku efektif selama tahun 2014, hibah ini bertujuan untuk mendukung Pemerintah dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Nilai hibah ini sendiri sebesar USD 1.518.014.

Realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja dapat terlihat pada Gambar 4.

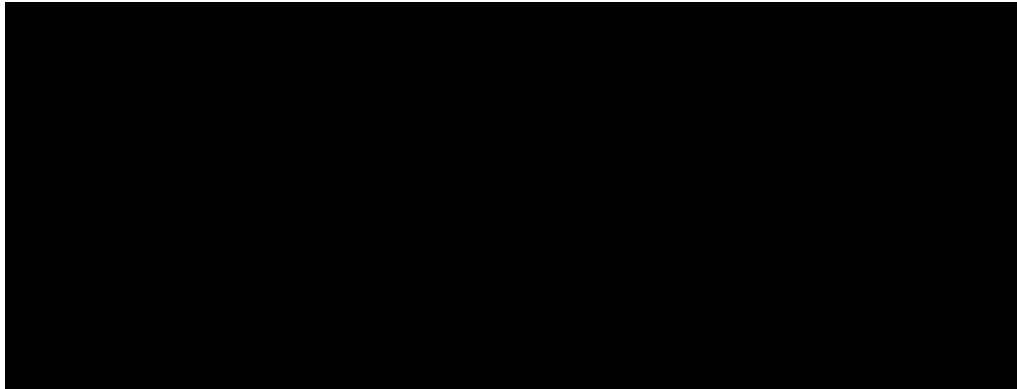
GAMBAR 4
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
SAMPAI TRIWULAN IV TAHUN 2014



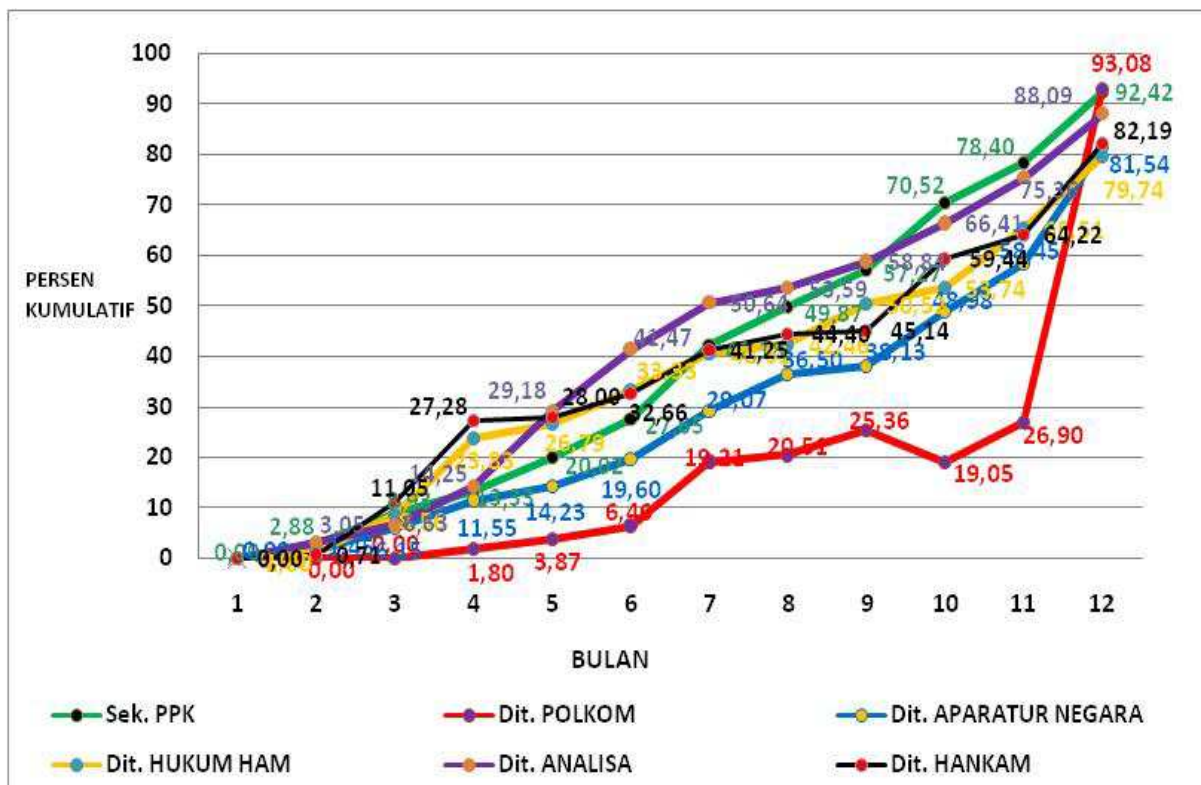
2) PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 17.327.585.000,-dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 15.139.688.393,- (87,37%).Kegiatan yang dilaksanakan oleh UKE II di Kedeputusan Bidang Polhukhankam dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasionalbidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan (RKP 2015) dan rencana pendanaan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 11 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 5.

TABEL 11
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TRIWULAN IV TAHUN 2014



GAMBAR 5
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG POLHUKHANKAM TRIWULAN IV TAHUN 2014

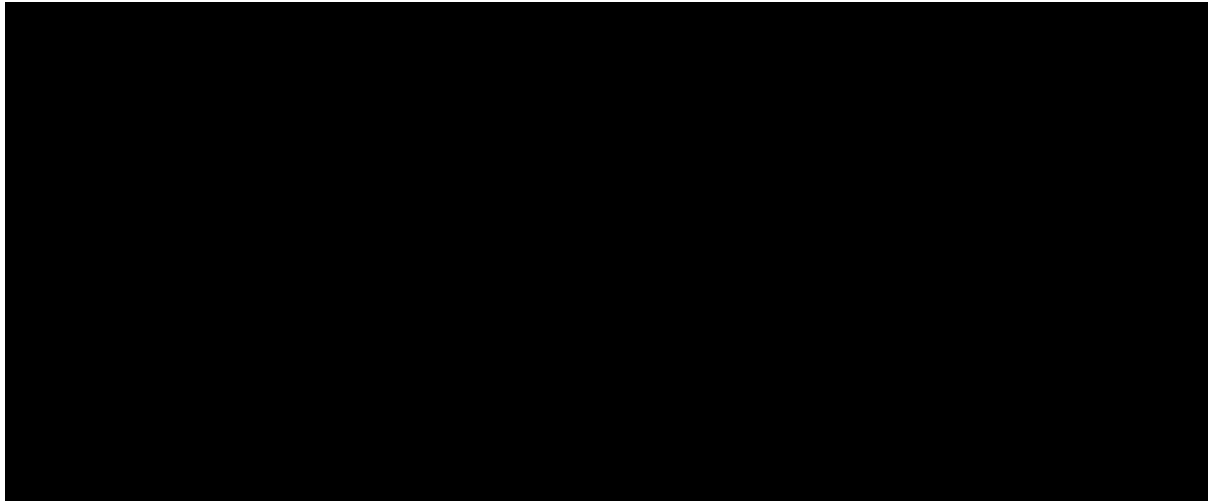


3) PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

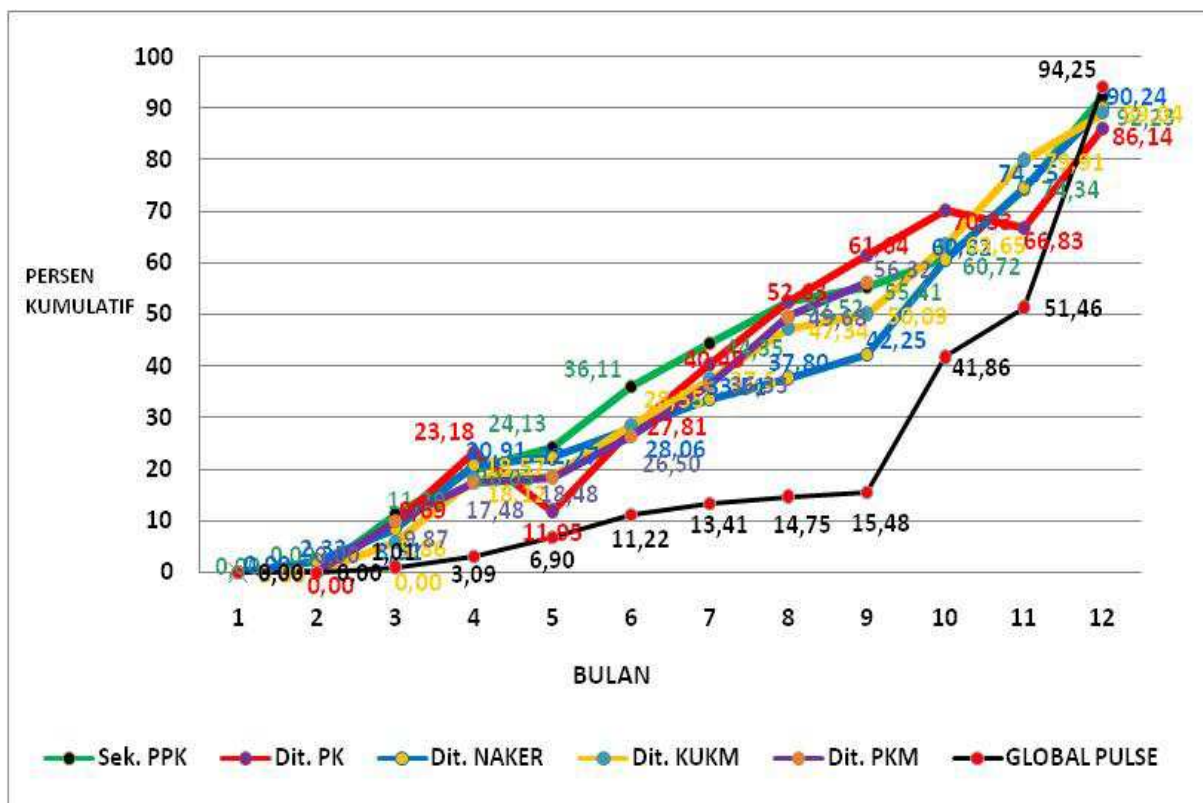
Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 23.709.780.000,-, dengan realisasi penyerapan sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 21.407.118.187,- (90,29%). Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada

Tabel 12 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 6.

TABEL 12
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG KKUKM TIRWULAN IV TAHUN 2014



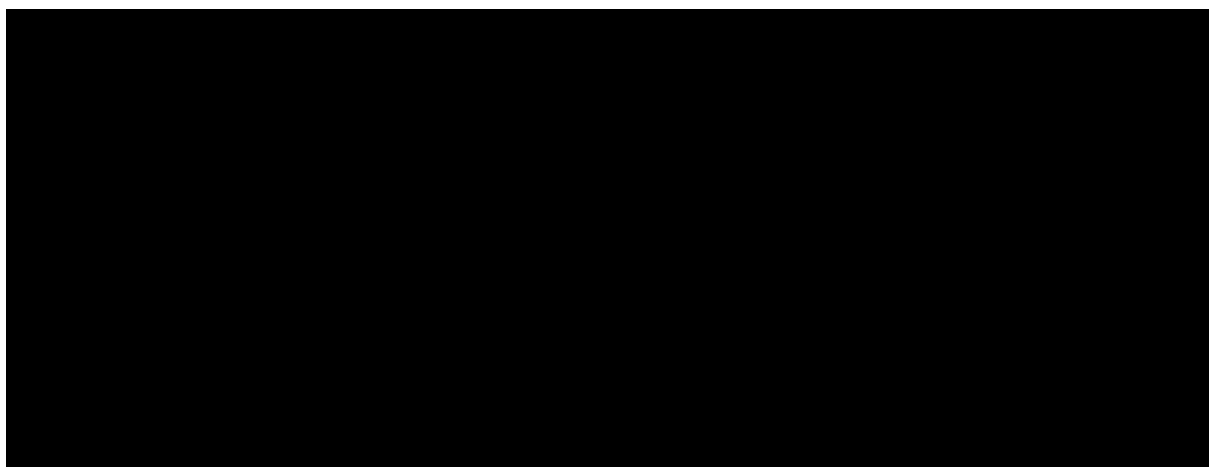
GAMBAR 6
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG KKUKM TRIWULAN IV TAHUN 2014



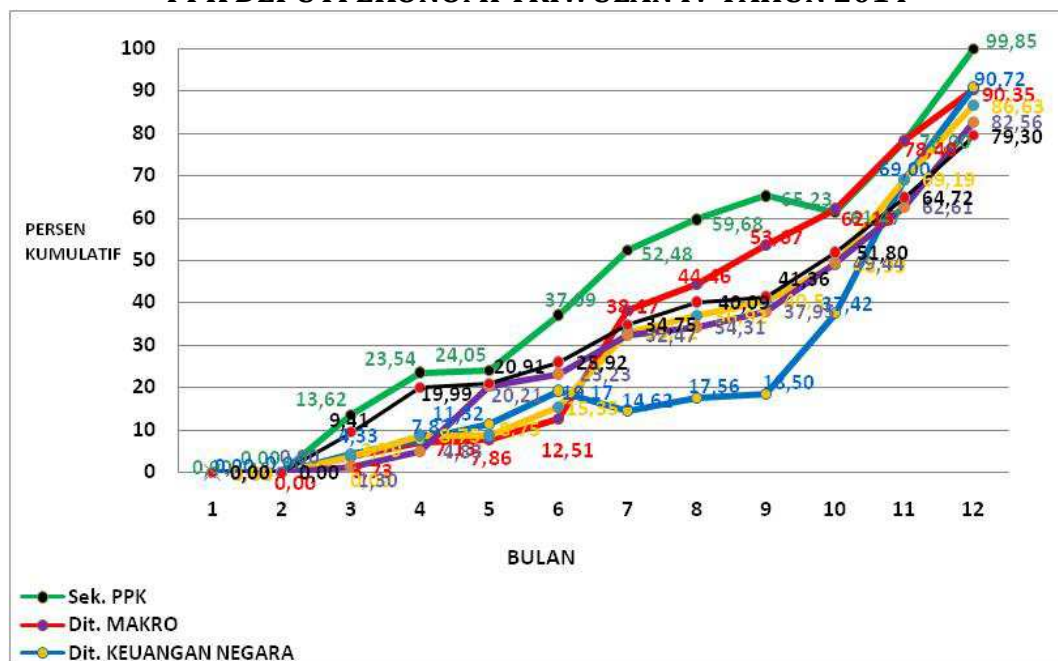
4) PPK Deputi Bidang Ekonomi

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Ekonomi pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 12.995.300.000,- dengan realisasi penyerapan sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 4.677.408.800,- (35,99%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 13 dan dengan perkembangan realisasi penyerapan anggaran setiap bulan terlihat pada Gambar 7.

TABEL 13
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG EKONOMI TRIWULAN IV TAHUN 2014



GAMBAR 7
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI EKONOMI TRIWULAN IV TAHUN 2014



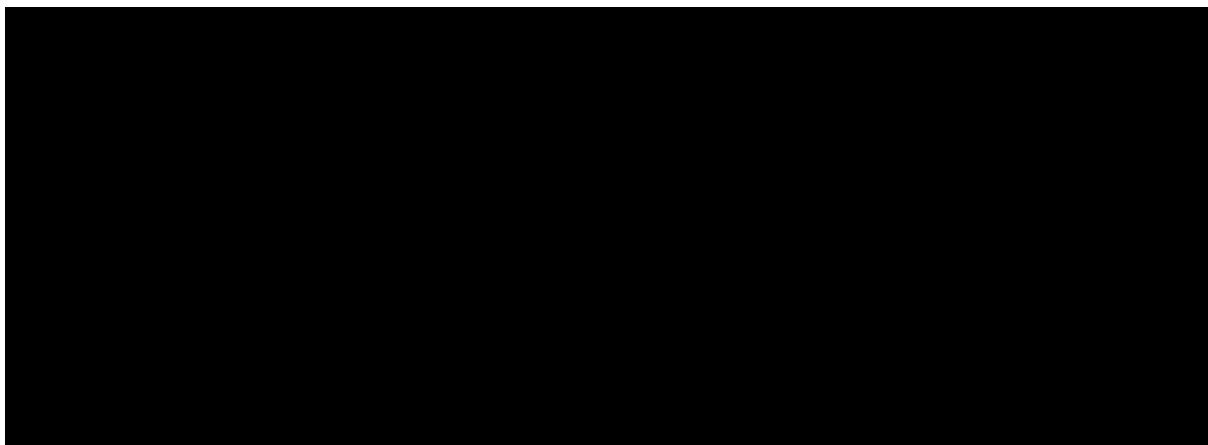
5) PPK Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran PPK Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 25.000.165.000,-, yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 27.991.278.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 10.876.078.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Desember 2014 mencapai sebesar Rp. 25.909.168.634,- (92,56%) untuk dana RM, sedangkan untuk dana HLN Rp. 10.873.222.436,- (99,97%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian sebagaimana terdapat pada Tabel 14 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing UKE II terlihat pada Gambar 7.

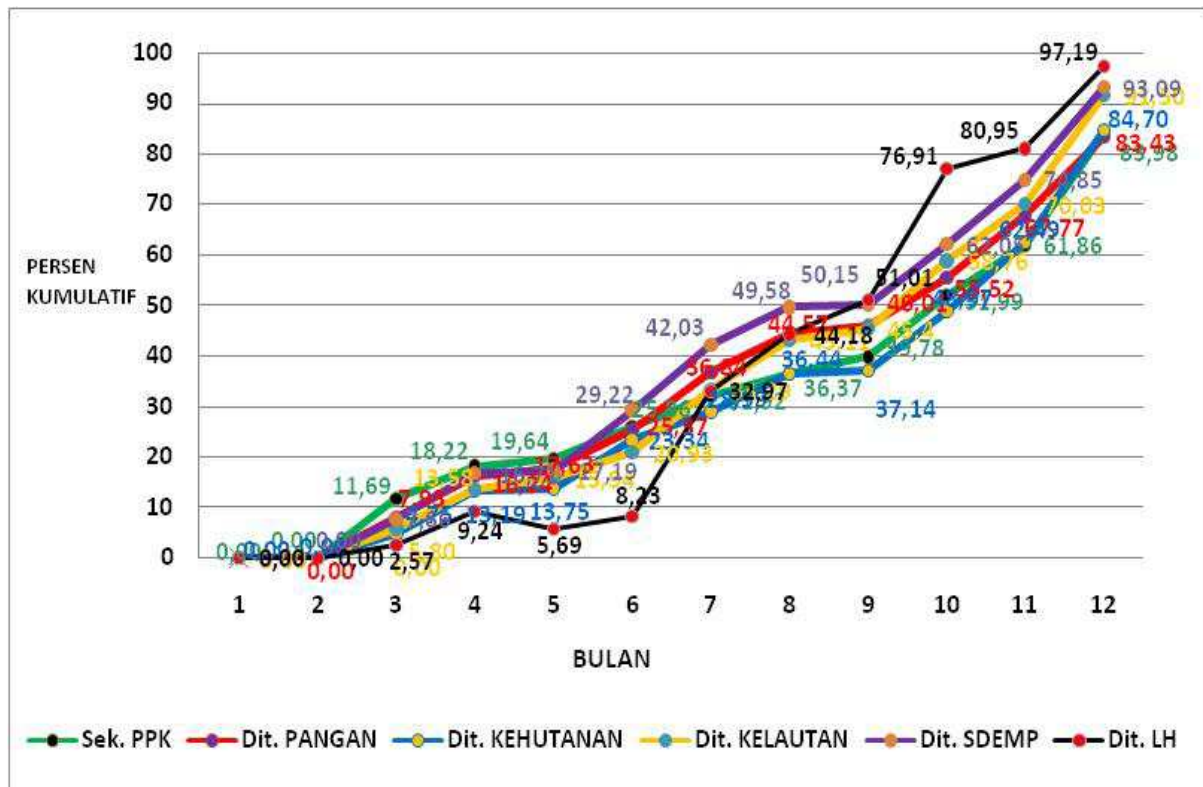
Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2014 ini antara lain:

- Proses revisi 4 tentang penghematan anggaran memakan waktu yang lama sehingga menyebabkan beberapa unit kerja menunda kegiatan hingga proses revisi selesai karena penghematan anggaran pada waktu itu cukup besar.
- Untuk Hibah *Preparation ICCTF*, sampai saat ini, status pengajuan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) *Preparation ICCTF* mencapai 73,42%. Status Realisasi berdasarkan SPHL sebesar 54,24%. Kendala yang Sekt. PPK alami dalam mengesahkan Hibah ICCTF adalah unit kerja yang bersangkutan terkadang agak terlambat dalam menyampaikan berkas hibah untuk proses pengesahan sehingga pengajuan SP2HL ke Bagian Verifikasi Anggaran juga menjadi agak terlambat.

TABEL 14
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SDALH TRIWULAN IV TAHUN 2014



GAMBAR 8
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SDALH TRIWULAN IV TAHUN 2014



6) PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana

Alokasi anggaran PPK Deputy Bidang Sarana dan Prasarana pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 29.669.866.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 14.239.940.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 15.429.926.000,-. Dana HLN dilaksanakan oleh Direktorat Pemukiman dan Perumahan. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2014 untuk dana RM sebesar Rp. 13.097.884.246,- (91,98%), dan dana hibah sebesar Rp. 7.974.135.923,- (51,68%).

Hibah dari Bank Dunia, *Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA)* bertujuan untuk mendukung pencapaian target *Millennium Development Goals (MDGs)* yaitu tujuan ke tujuh target ke 11 yaitu pada tahun 2020, mencapai perbaikan hidup penduduk di kawasan kumuh yang signifikan. Permasalahan yang terjadi pada triwulan III 2014, adalah penambahan kegiatan *Slum Externalities Study, Slum Mapping, dan Diseminasi* kepada Pemerintah Daerah yang tercantum dalam *Amandment Contract No.2* tidak disertai dengan perpanjangan durasi kontrak, padahal keseluruhan kegiatan tersebut merupakan kegiatan besar yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih lama. Hal tersebut mempengaruhi realisasi pengerjaan dana penyerapan. Terhadap permasalahan tersebut diatas

Bappenas, Bank Dunia, dan Sucofindo Advisory Utama sepakat untuk memperpanjang durasi kontrak konsultan dari semula 24 bulan menjadi 26 bulan (5 Oktober 2012 - 4 Desember 2014) melalui *Amandment Contract No.3* tanggal 29 Desember 2014. Perpanjangan durasi kontrak tidak disertai dengan penambahan budget.

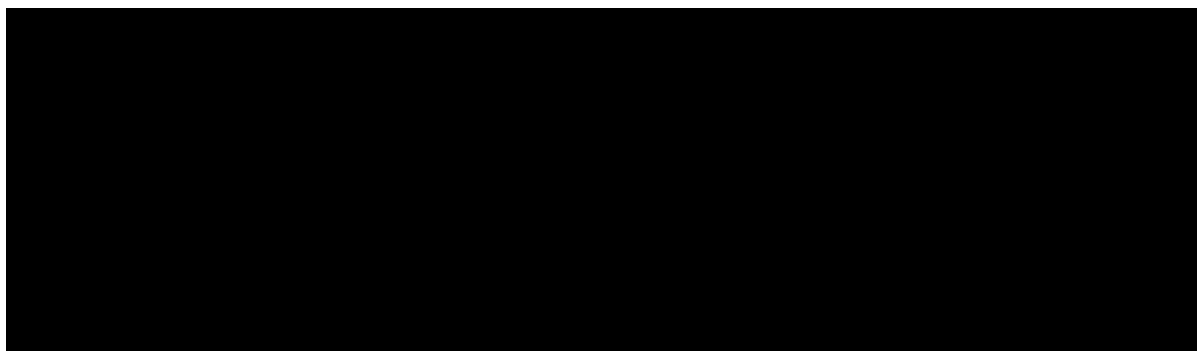
Selain SAPOLA, Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas juga bertanggung atas hibah Bank dunia lainnya, *Water and Sanitation Policy And Action Planning (Waspola) Facility*. Hibah yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia dalam mengarahkan pembangunan sektor Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) melalui fasilitasi yang fleksibel dalam bentuk pengembangan kebijakan dan program, pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sektor AMPL. Beberapa permasalahan Waspola yang terjadi pada triwulan III antara lain:

- Belum adanya kandidat penyedia jasa yang sesuai dengan KAK untuk individual konsultan pengadaan.
- Penyusunan jadwal pelaksanaan paket video RPAM mengalami keterlambatan terkait persiapan daerah yang akan dijadikan lokasi shooting
- Pembayaran *Office Equipment dan Electronic* mengalami keterlambatan karena penerapan SPAN
- Finalisasi KAK untuk training LN mengalami beberapa perubahan
- Pengajuan dan pencairan dana TUP mengalami keterlambatan

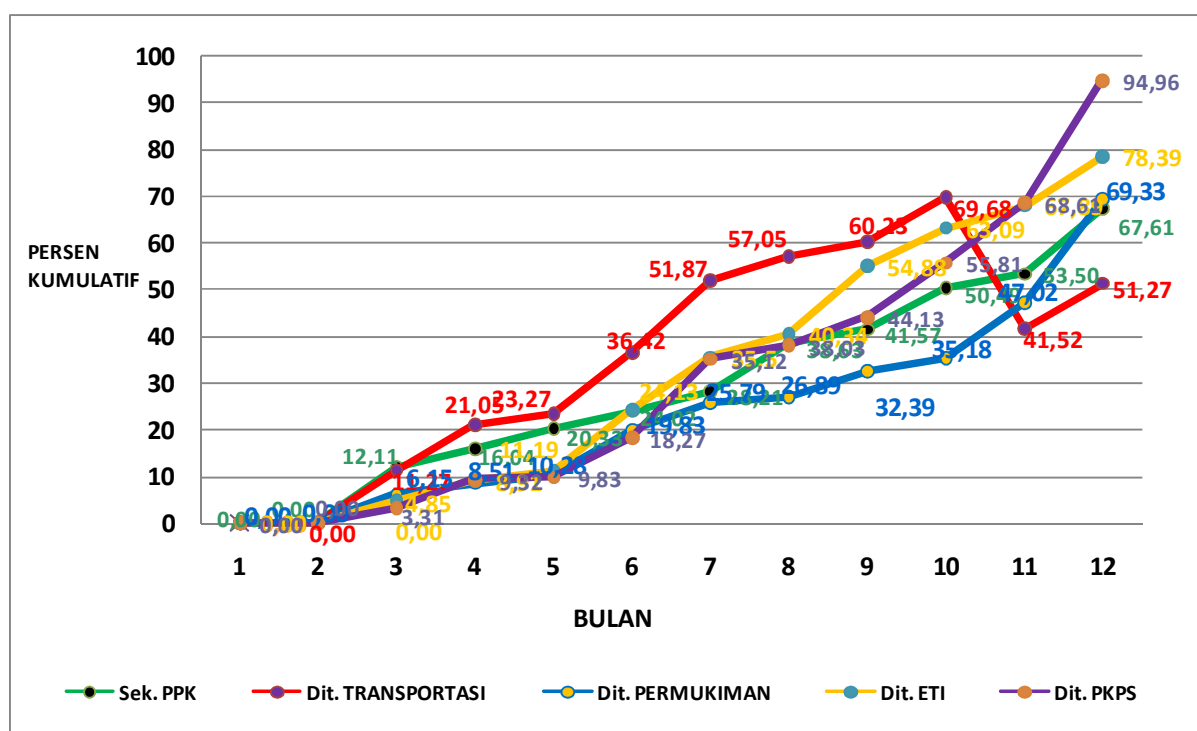
Untuk permasalahan tersebut, pihak pengelola hibah telah berkoordinasi dengan Bank Dunia dalam hal penunjukan langsung konsultan individu. Untuk penyusunan jadwal paket video RPAM dilakukan addendum jangka waktu penyelesaian kontrak.

Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 15 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 8.

TABEL 15
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN IV TAHUN 2014



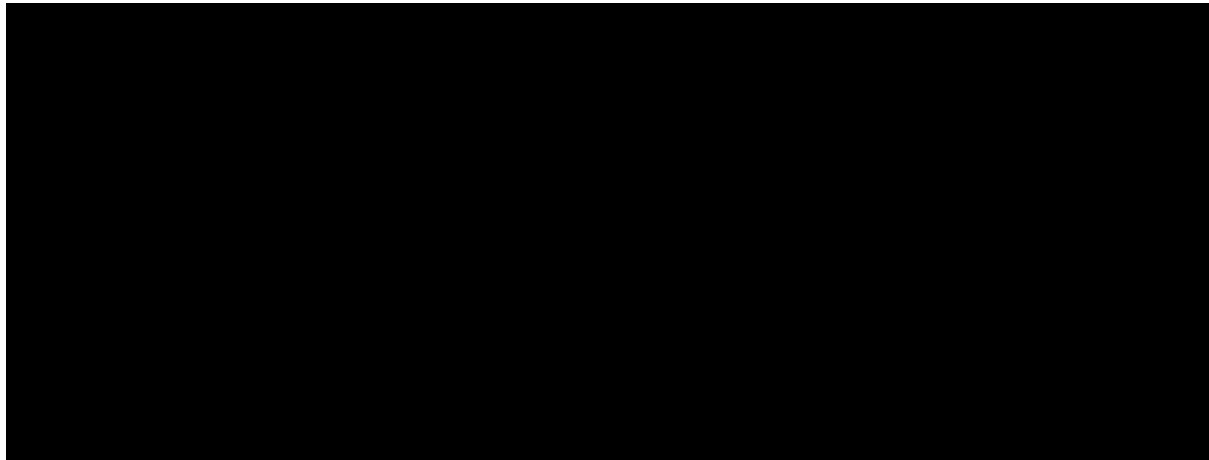
GAMBAR 9
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI SARANA DAN PRASARANA TRIWULAN IV TAHUN 2014



7) PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah tahun 2014 sebesar Rp. 30.306.000.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 23.562.012.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 6.743.988.000,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir Desember 2014 ini mencapai Rp. 20.752.241.525,- (88,07%) sebagaimana terdapat pada Tabel 16.

TABEL 16
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2014



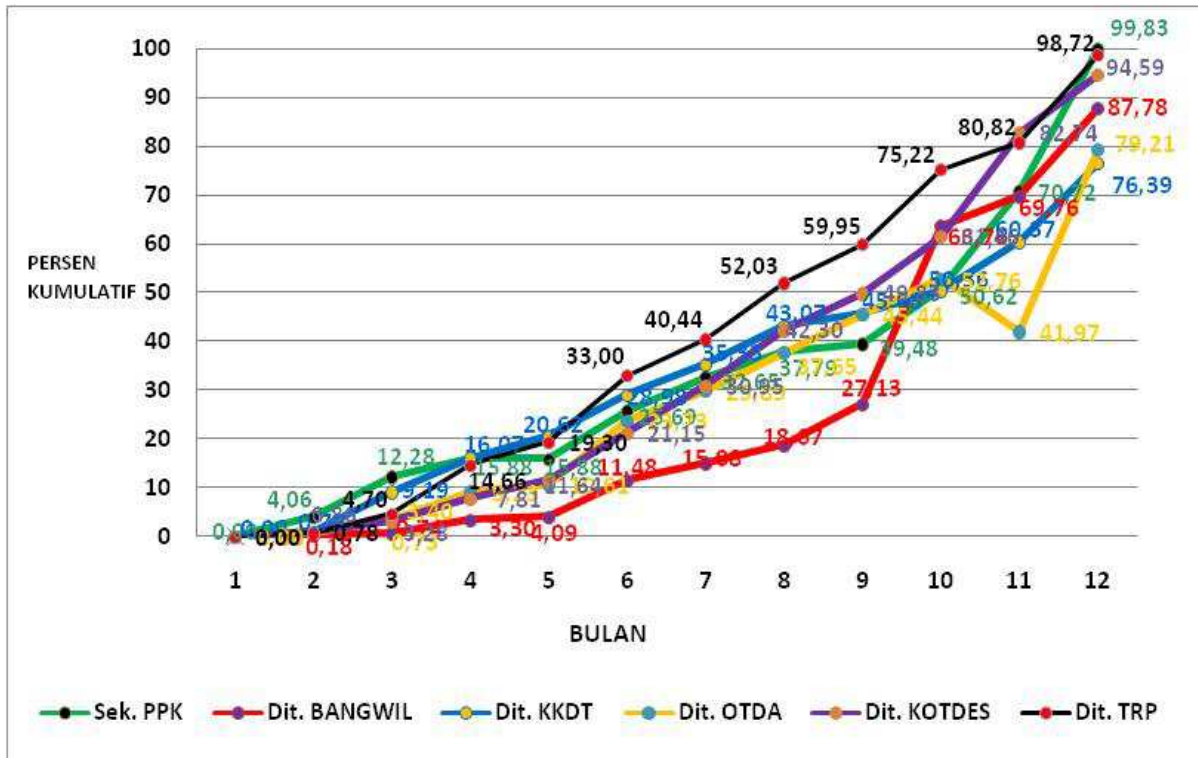
Alokasi pinjaman luar negeri terdapat pada Direktorat Pengembangan Wilayah dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam kegiatan *Regional Infrastructure for Social and Economic Development* (RISE) I atau Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Program PISEW dengan intervensi berupa bantuan teknis dan investasi infrastruktur dasar pedesaan, dibangun dengan berorientasi pada konsep *Community Driven Development* (CDD) dan *Labor Intensive Activities* (LIA), sehingga kemudian dikategorikan sebagai salah satu program inti PNPM-Mandiri.

Kementerian PPN/Bappenas merupakan instansi penanggung jawab pinjaman JICA dengan Direktorat Pengembangan Wilayah sebagai tim pelaksana mengkoordinasikan instansi lainnya yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagai instansi penanggung jawab, alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PNPM-PISEW ini berada di Kementerian PPN/Bappenas.

Proyek pinjaman RISE I ini akan berakhir pada tahun 2014, dan pada tahun 2014 ini telah efektif pinjaman RISE II. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program PISEW pada tahun 2014 adalah registrasi kegiatan dalam DIPA 2014 merupakan alokasi gabungan dari RISE I dan RISE II dan teregister dalam nama RISE I.

Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedeputan Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah terlihat pada Gambar 10.

GAMBAR 10
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL DAN OTONOMI DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN 2014

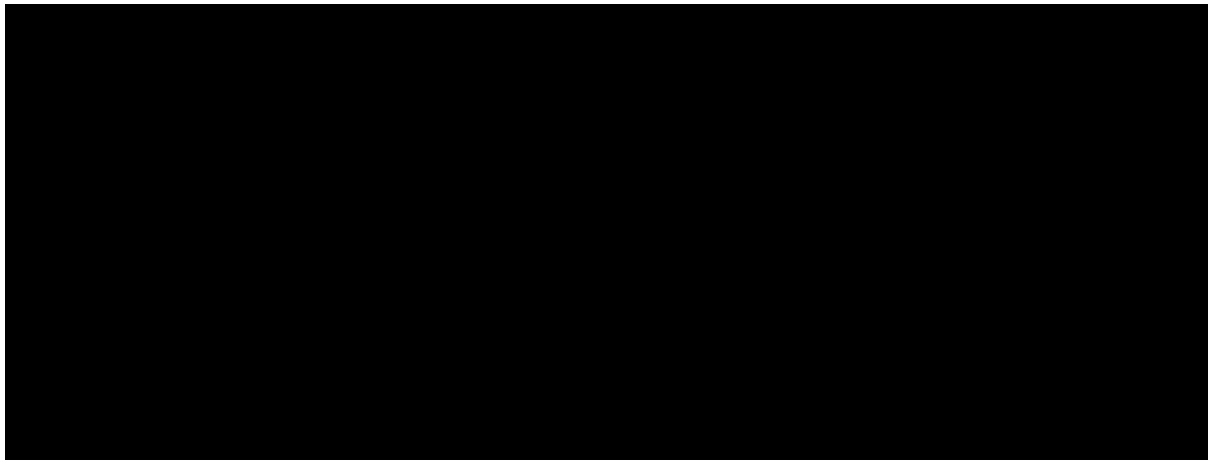


8) PPK Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan di Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan dalam rangka mendukung penyusunan rancangan kebijakan perencanaan pembangunan nasional bidang pendanaan pembangunan (RKP 2015) dan rencana pendanaan nasional. Kedepuitan Bidang Pendanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2014 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 19.170.496.000,- terdiri dari RM sebesar Rp. 14.535.800.000,- dan dana PHLN sebesar Rp. 4.634.696.000,-.

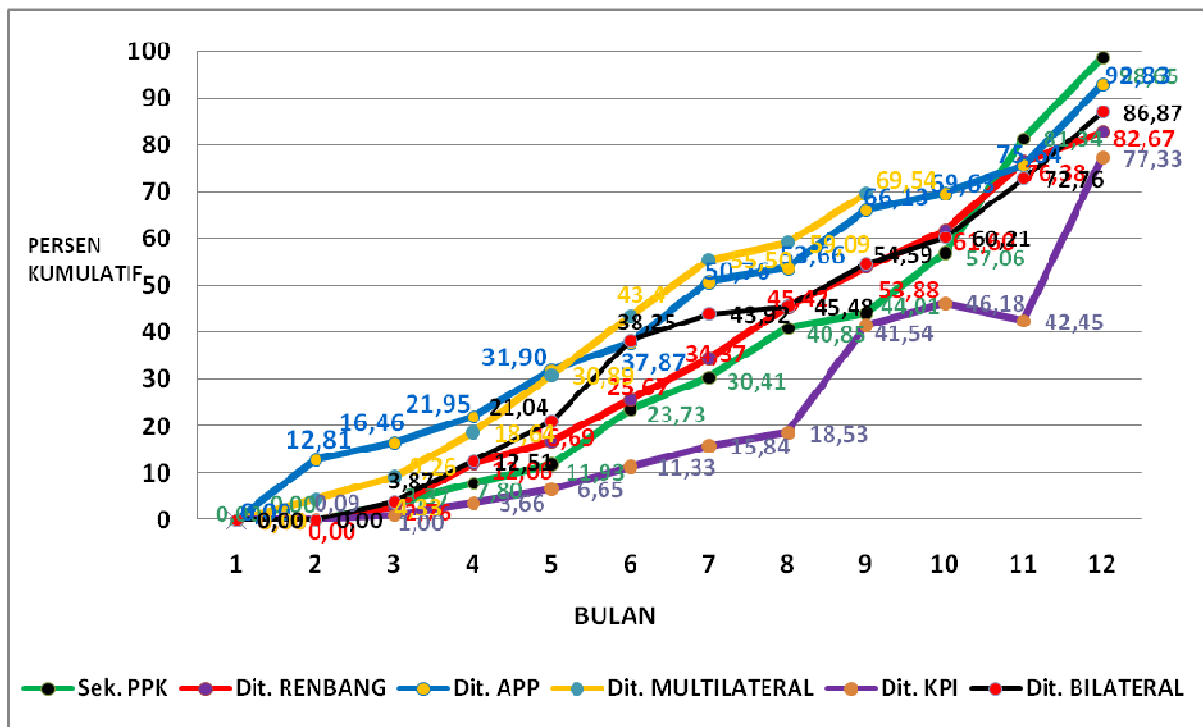
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2014 mencapai sebesar Rp. 16.236.788.900,- (84,70%) sebagaimana terdapat pada Tabel 17.

TABEL 17
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN IV TAHUN 2014



Perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan di masing-masing unit kerja Kedeputusan Bidang Pendanaan Pembangunan terlihat pada Gambar 11.

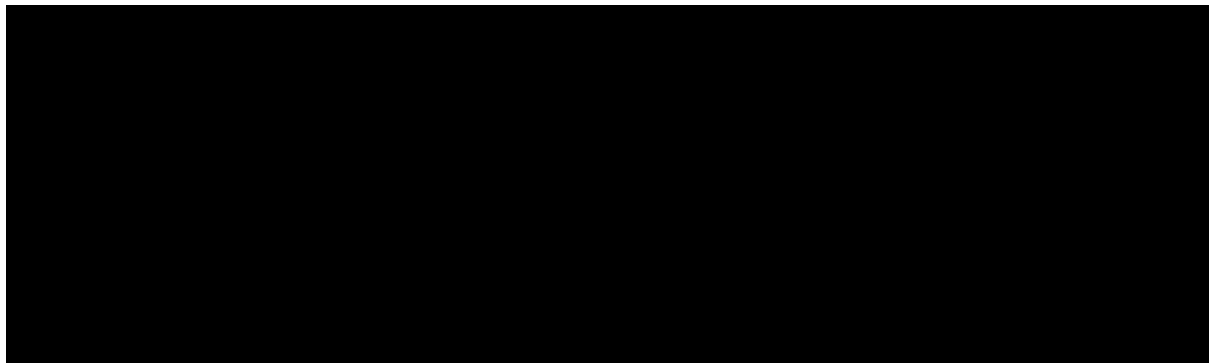
GAMBAR 11
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI PENDANAAN PEMBANGUNAN TRIWULAN IV TAHUN 2014



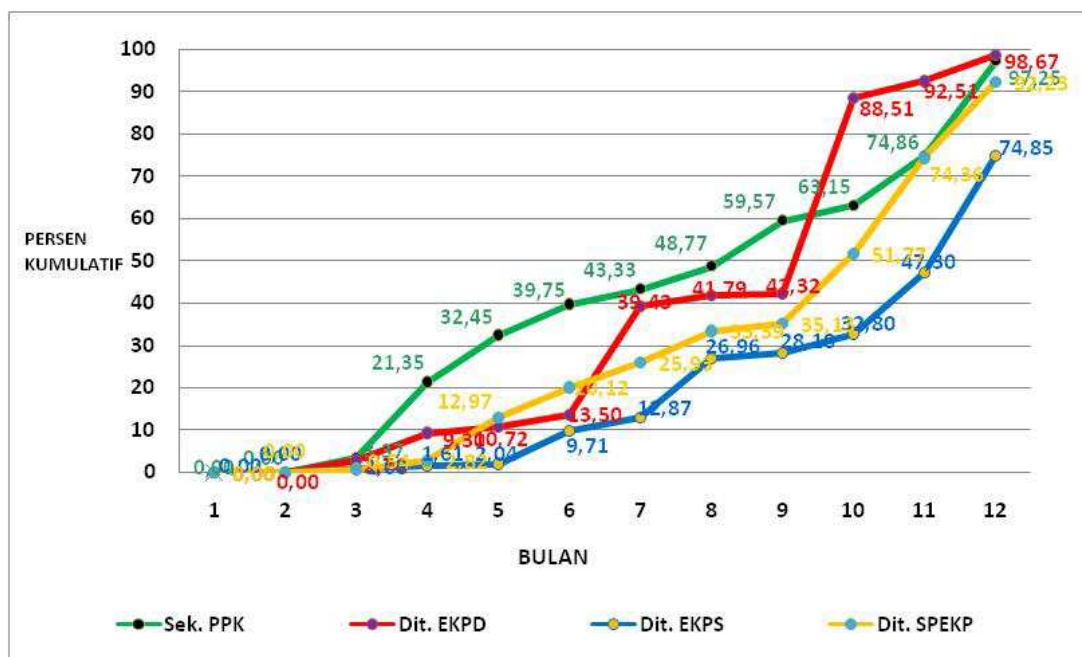
9) PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

Alokasi anggaran PPK Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 14.045.800.000,-, dengan realisasi penyerapan mencapai sebesar Rp. 13.114.573.172,-(93,37%). Anggaran tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pada UKE II termasuk untuk kegiatan koordinasi kedeputian. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran setiap UKE II terdapat pada Tabel 18 dan perkembangan realisasi penyerapan dana setiap bulan dapat terlihat pada Gambar 12.

**TABEL 18
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI BIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN IV
TAHUN 2014**



**GAMBAR 12
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK DEPUTI EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TRIWULAN IV TAHUN 2014**



10) PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu

Alokasi anggaran PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 22.660.090.000,- yang terdiri dari RM sebesar Rp. 5.171.990.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 17.488.100.000,-, dengan realisasi penyerapan RM sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 4.449.391.255,- (86,03%), sementara realisasi penyerapan dana PLN mencapai 67,63% atau sebesar Rp. 11.826.879.228,- Dana program ini dialokasikan untuk kegiatan tentang pengairan dan irigasi di Direktorat Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

PPK Program Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu mengelola beberapa kegiatan yang berasal dari pinjaman luar negeri, yaitu: (1) *Water Resources and Irrigation Sector Management Project (WISMP) Phase II-WB* sebesar Rp. 2.253.729.000,-; (2) *Participatory Irrigation Rehabilitation and Improvement Management Project (PIRIMP)-ADB* sebesar Rp. 2.100.000.000,-; (3) *Decentralized Irrigation System Improvement Project in Eastern Region of Indonesia (DISMP II)-JICA* sebesar Rp. 2.000.000.000,-; (4) *Urban Flood Control System in Selected Cities (UFC)-JICA* sebesar Rp. 2.472.270.000,-; (5) *Dam Operation Improvement and Improvement and Safety Project (DOISP)-WB* sebesar Rp. 1.048.984.000,-; dan (6) *Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program (ICWRMIP)* sebesar Rp. 7.613.117.000,-.

Pinjaman WISMP II yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai dan irigasi serta meningkatkan produktivitas pertanian di lahan beririgasi. Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas sebagai salah satu instansi pelaksana WISMP II bertanggung jawab atas Kategori 01 - *Goods, non-consulting services (including for audits), training, and operating cost for part 1 (a)(i) and (b) (i), 2 (d), 3, and 4 (a) of the project.* Pada tahun ketiga pelaksanaan, WISMP II komponen Kemen. PPN/Bappenas ini telah mampu menarik dana sebesar Rp 448.105.423 dari total alokasi DIPA 2014.

Dengan tujuan untuk peningkatan produksi padi melalui rehabilitasi dan pengembangan sistem jaringan irigasi dan peningkatan operasi dan pemeliharaannya di lokasi bagian barat Indonesia untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan nasional, PIRIMP II dilaksanakan oleh beberapa instansi dibawah koordinasi Ditjen Sumber Daya Air, Kemen. PU. Direktorat Pengairan dan Irigasi, Bappenas bertanggung jawab atas pelaksanaan komponen jasa konsultasi.

Pinjaman JICA, UFC bertujuan untuk mengurangi kerusakan banjir di kota-kota terpilih dengan memperbaiki infrastruktur pengendali banjir, meningkatkan

kapasitas pengelolaan DAS dan pengembangan rencana manajemen banjir dengan tujuan untuk mendukung agenda nasional adaptasi perubahan iklim, dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan industri di kota-kota di Indonesia. Sama seperti pinjaman yang lain,

Dengan bertujuan untuk pengelolaan Sumber Daya Air Secara Terpadu di Wilayah Sungai Citarum, pinjaman ICWRMP mempunyai banyak sasaran program, diantaranya untuk memperbaiki kualitas air di saluran dan reservoir.

11) PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program*

Alokasi anggaran tahun 2014 pada PPK Sekretariat *Infrastructure Reform Sector Development Program* sebesar Rp. 54.382.567.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 7.828.567.000,- dan dana PLN sebesar Rp. 46.554.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan *Infrastructure Reform Sector Development (IRSDP)/ Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD)*. Realisasi penyerapan anggaran RM sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 7.329.544.710,- (93,63%), sementara realisasi penyerapan dana PLN sebesar 67,81%.

Kegiatan P2MPD bertujuan memberikan bantuan teknis untuk memfasilitasi penyiapan proyek infrastruktur dengan mengikutsertakan sektor swasta, yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta dengan rincian kegiatan:

- a) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Teknis/Program (IRSDP, Sekretariat WASAP, Koordinasi Perencanaan Infrastruktur, Sekretariat PPITA)
- b) Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan
- c) Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
- d) Pengadaan Peralatan
- e) Monitoring dan Evaluasi

Pada triwulan III tahun 2014 ini, beberapa paket pekerjaan masih dalam proses lelang dan beberapa paket tidak lagi didanai dari IRSDP dan didanai melalui mekanisme pendanaan lain, antara lain *Cruise Ship Terminal Tanah Ampo, Karang Asem (Bali), Surakarta Solid Waste Disposal, Southern Bali Water Supply, Malioboro Urban Development, West Semarang Water Supply*.

12) PPK Pengelola Hibah MCC

Pada tanggal 19 November 2011 Pemerintah Amerika Serikat diwakili Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton dan Pemerintah Indonesia diwakili Menteri Keuangan,

Agus Martowardjojo menandatangani *MCC-Compact Agreement*(Perjanjian Hibah *Program Compact*) selama 5 tahun dengan nilai USD 600 juta.

Tujuan dari *Program Compact* adalah mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tiga program yaitu: (1) Kemakmuran Hijau (*Green Prosperity*), (2) Kesehatan Gizi Berbasis Masyarakat untuk Mencegah Anak Pendek (*Community-based Health and Nutrition*), (3) Modernisasi Sistem Pengadaan (*Procurement Modernization*). *Program Compact* di Indonesia dimulai sejak ditandatanganinya *Implementation Letter* oleh Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dengan *VP-Department of Compact Operations – MCC* pada tanggal 2 April 2013 dan akan berakhir pada tanggal 1 April 2018.

Sesuai dengan PMK No. 124/PMK.05/2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah MCC bahwa pelaksanaan anggaran yang berasal dari Hibah MCC dialokasikan dalam DIPA Satker Pengelola Hibah MCC. Selain alokasi dari Hibah MCC, dalam DIPA Satker juga dialokasikan dana yang bersumber dari rupiah murni untuk operasional Satker dan penggantian pajak terkait hibah *Program Compact*.

Pelaksanaan anggaran HLN yang dialokasikan dalam DIPA tersebut menggunakan mekanisme Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) sedangkan untuk alokasi Rupiah Murni menggunakan mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Alokasi anggaran PPK Pengelola Hibah MCC pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 130.000.000.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan dana HLN sebesar Rp. 130.000.000.000,- dengan realisasi penyerapan dana RM sampai dengan akhir Desember 2014 mencapai sebesar Rp 9.580.583.191,- (95,81%), sementara realisasi penyerapan dana HLN mencapai 98,97%, atau sebesar Rp 118.759.953.916,- yang di bawah koordinasi Direktorat Energi, Telekomunikasi dan Informatika.

13) PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya I

Program Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada dalam tanggung jawab PPK Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang sebesar Rp 19.375.420.000,-. Realisasi penyerapan dana sampai dengan akhir Desember 2014 sebesar Rp 14.263.044.781,- (73,61%).

14) Dana Dekonsentrasi 2014

Secara keseluruhan pelaksanaan dana dekonsentrasi tahun 2014 di seluruh provinsi berjalan dengan baik, hanya Provinsi Jawa Barat yang tidak

menggunakan dana dekonsentrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan MP3EI, RAD dll karena telah dialokasi dana APBD. Permasalahan ini sudah mendapat perhatian dan sedang dalam penyelesaian, namun Pemda Jawa Barat tetap diwajibkan untuk membuat laporan keuangan, meskipun tidak mempergunakannya karena sudah dialokasikan dalam APBN.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan yang dapat diinventarisasi dalam pelaksanaan dana dekonsentrasi secara keseluruhan antara lain:

1. Dana

- a. Ketersediaan anggaran terbatas sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan 8 fokus kegiatan dekonsentrasi 2014
- b. Anggaran dekonsentrasi kurang memadai sehingga belum semua kegiatan prioritas nasional dapat tertampung
- c. Dalam rangka optimalisasi peran gubernur dalam pengendalian DKTPUB, KP, dan KD perlu peningkatan pembiayaan koordinasi pemantauan pelaporan dan evaluasi DKTPUB
- d. Tidak ada dana untuk pokja masing-masing kegiatan, sehingga pokja yang ada tidak dapat bekerja maksimal
- e. Kendala koordinasi untuk melakukan evaluasi maupun sosialisasi tidak menyentuh langsung ke kabupaten/kota karena dukungan dana yang terbatas sehingga akumulasi data tidak optimal
- f. Lamanya proses pencairan dana dekonsentrasi dan peruntukannya untuk beberapa kegiatan
- g. Keterlambatan proses pencairan karena harus menunggu kelengkapan administrasi (SPJ) kegiatan sebelumnya
- h. Dana dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas hanya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinasi, belum terakomodirnya belanja terkait Jasa Konsultan Pihak ke 3

2. SDM

- a. Kurangnya tenaga ahli dalam perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca
- b. Terbatasnya staf pelaksana
- c. Keterbatasan tenaga pelaksana dan data

3. Waktu

- a. *Time line* setiap proyek tidak mungkin dicapai dan ada aturan yang berbeda dengan APBD Provinsi
- b. Keterbatasan waktu penilaian pangripta kabupaten/kota
- c. Waktu pelaksanaan kegiatan kadang-kadang bersamaan dengan kegiatan APBD

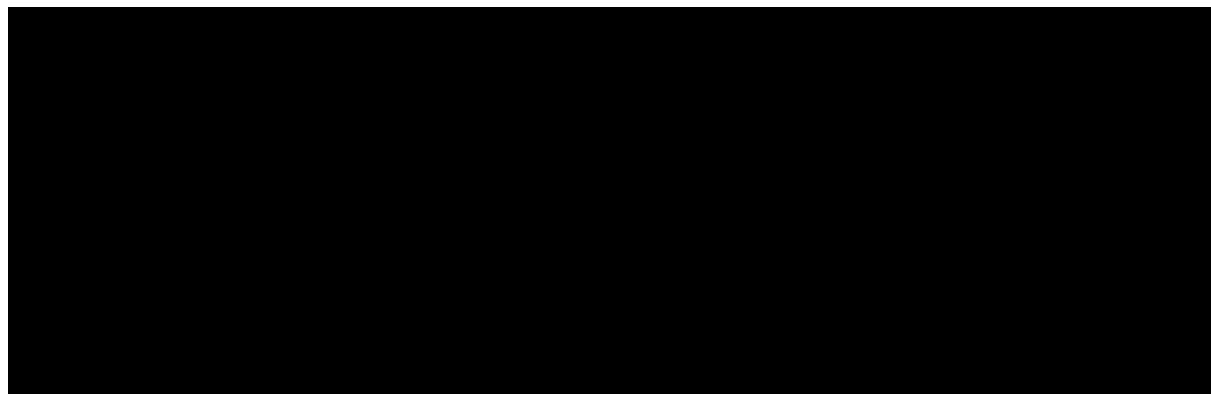
4. Koordinasi
 - a. Kurangnya koordinasi/sinergi antara pelaksana kegiatan di bidang Pelaksana dengan anggota satker dalam perencanaan dan pelaksanaan dekonsentrasi, sehingga mengakibatkan seringnya revisi POK
 - b. Perlu adanya koordinasi yang lebih intensif antara bidang perencanaan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan DIPA
 - c. Sulitnya koordinasi antar bidang karena volume kegiatan bidang yang cukup tinggi
5. Perencanaan
 - a. Pelaksanaan perencanaan dana dekonsentrasi perlu disiapkan dengan matang
 - b. Juklak/Juknis yang kurang fleksibel
 - c. Kendala di awal pelaksanaan DIPA, RKA KL yang diterima namun masih gelondongan atau belum terperinci per akun kegiatan sehingga harus dilakukan revisi kembali
 - d. Adanya perubahan sistem aplikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dekonsentrasi seperti pencairan, pembukuan, dan pengadministrasian lainnya pada tahun berjalan
 - e. Dalam pedoman pelaksanaan dekonsentrasi Bappenas, fokus dan arahan terhadap hasil yang akan dicapai kurang jelas
6. Program/Kegiatan
 - a. Belum ada dukungan bagi sektor-sektor yang terkait dengan kegiatan MP3EI dan RAD GRK
 - b. Cakupan kegiatan tidak seluruhnya sesuai keinginan daerah
 - c. Padatnya kegiatan di Bappeda dalam pelaksanaan APBD
7. Administrasi
 - a. SK KPA, PPK dan bendahara menjadi satu SK yang ditandatangani gubernur, sehingga ketika terjadi mutasi pejabat maka pelaksanaan kegiatan menunggu SK revisi
 - b. Penggantian bendahara pengeluaran menjadi kendala dalam perubahan administrasi kegiatan dan memerlukan waktu dalam penyesuaian tahapan kegiatan
 - c. Adanya kendala internal dikarenakan adanya penggantian kuasa pengguna anggaran sehingga memerlukan proses revisi SK dan adanya proses pergeseran dan penambahan akun baru pada RKA

B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Untuk mendukung pencapaian sasaran program, pada tahun 2014 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 584.001.704.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 307.978.278.400,- dan dana PHLN sebesar Rp 276.023.425.600,-. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2014 mencapai Rp. 489.468.254.953,- (83,81%) yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 249.473.333.977,- (81,00%), sedangkan dana PHLN sebesar Rp. 239.994.920.976,- (86,95%).

Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dikelola oleh 4 (empat) PPK di Setmen PPN/Settama Bappenas dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing PPK dapat dilihat pada Tabel 19.

TABEL 19
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2014



Dari tabel diatas diketahui bahwa penyerapan dana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya telah mampu mencapai sebesar 83,81% dari total alokasi tahun 2014. Pusdatinrenbang yang mengelola alokasi dana terbesar di Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya termasuk didalamnya mengelola 3 pinjaman luar negeri, yaitu SPIRIT, PHRDP III dan PHRDP IV telah mampu menyerap dana 84,95%. Sementara Kegiatan IDF-*Strategic Management and Institutional Strengthening Project* yang dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia sampai dengan akhir Desember 2014 ini menyerap dana 84,95%. Hibah yang berasal dari Bank Dunia ini mempunyai pagu sebesar Rp 3.098.090.000,- .

Seperti halnya dengan Program Perencanaan Pembangunan Nasional, pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya juga terkendala

dengan aplikasi SPAN. Aplikasi SPAN yang belum sempurna, menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran beasiswa kepada karyasiswa yang sedang menuntut ilmu di negara lain. Keterlambatan pembayaran ini berdampak bagi karyasiswa mengingat biaya hidup di negara asing sangat tinggi.

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

Alokasi anggaran tahun 2014 pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas sebesar Rp. 33.000.000.000,- dikelola oleh PPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 31.446.774.834,- (95,29%).

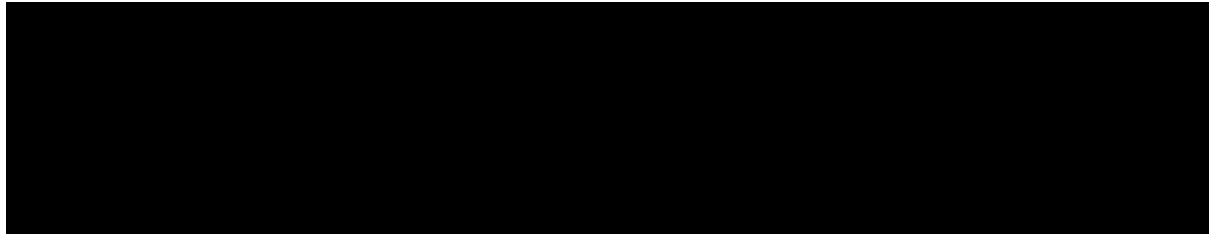
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur termasuk penyediaan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, pengembangan sistem data/informasi perencanaan pembangunan, dan sistem data/informasi dalam pengelolaan aset (Barang Milik Negara). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 2) Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional.
- 3) Peningkatan Kualitas Pendukung Pelayanan Umum dan Operasional.

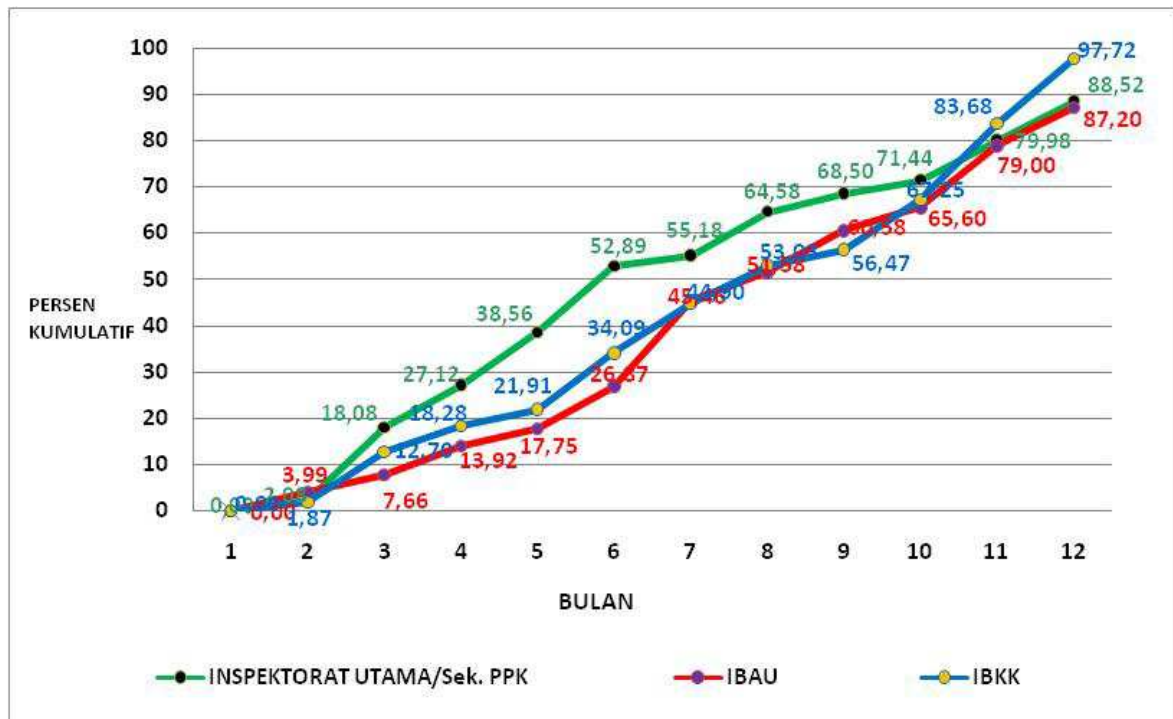
D. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

Alokasi anggaran tahun 2014 pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas sebesar Rp. 4.300.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 3.929.931.932,- (91,39%) yang dikelola oleh PPK Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Bappenas. Anggaran program ini dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada lingkup masing-masing UKE II. Secara rinci realisasi penyerapan anggaran pada setiap unit kerja dapat dilihat pada Tabel 20 dan perkembangan realisasi setiap bulan pada Gambar 13.

TABEL 20
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS
APARATUR BAPPENAS TRIWULAN IV TAHUN 2014



GAMBAR 13
PERKEMBANGAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
PPK PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGAWASAN AKUNTABILITAS
APARATUR BAPPENAS TRIWULAN IV TAHUN 2014



BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Desember 2014 (Triwulan IV), dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada tahun anggaran 2014 untuk Satker Kementerian PPN/Bappenas dan Satker MCC adalah sebesar Rp. 1.055.551.879.000,- terdiri dari dana RM sebesar Rp. 533.235.005.400,-, dan PHLN sebesar Rp. 522.316.873.600,-. Dari sejumlah dana tersebut, realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 899.947.954.410,- (85,26%), yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 448.826.506.072,- (84,17%), dan dana PHLN sebesar Rp. 451.121.448.338,- (86,37%). Penyerapan ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan penyerapan dana pada periode yang sama tahun lalu yang mampu menyerap dana sebesar 91,39%.
2. Realisasi penyerapan anggaran Kementerian PPN/Bappenas sampai dengan Desember 2014 masih rendah, disebabkan antara lain:
 - a. Kebijakan terkait adanya penghematan dan pemotongan anggaran, menyebabkan pengelola kegiatan perlu melakukan revisi DIPA, sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.
 - b. Proses revisi/perubahan DIPA yang dilakukan beberapa kali, yang proses pengusulan dan pembahasan revisi cukup memakan waktu lama.
 - c. Lambatnya realisasi belanja karena keterlambatan menggelar lelang pengadaan.
 - d. Terjadinya pelaksanaan teknis dalam proses pencairan dana, seperti: penulisan nilai kontrak pada ringkasan kontrak tidak sesuai dengan kontrak, tidak melampirkan rekening penerima, penulisan nama pemilik rekening sering keliru, kesalahan penulisan jenis SPM pada SPM dll yang menyebabkan penundaan proses, karena dokumen harus dikembalikan lagi kepada unit kerja pengusul dan pada akhirnya menyebabkan tertundanya pencairan dana.
 - e. Sistem aplikasi SPAN Kementerian Keuangan yang belum berjalan dengan sempurna yang masih membuat kendala dalam proses pencairan dana sehingga mengakibatkan waktu yang lebih lama dalam proses.

- f. Kebijakan terkait efektivitas dan efisiensi kerja (SE Menpan RB No. 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara) yang meliputi :
 - 1) Penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja di lingkungan instansi
 - 2) Penghematan terhadap anggaran belanja barang dan belanja pegawai seperti :
 - Pembatasan perjalanan dinas
 - Pembatasan kegiatan rapat di luar kantor
 - Pembatasan pengadaan barang/jasa baru
 - g. Kebijakan terkait pembatasan kegiatan konsinyering/Focus Group Discussion (FGD), dan rapat-rapat teknis lainnya di luar kantor, seperti di hotel/villa/cottage/resort (SE Menpan RB No. 11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor)
3. Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan dana PHLN antara lain:
- a. Kurangnya kesadaran pengelola hibah untuk melakukan pencatatan dan pengesahan hibah serta baru melaksanakan pencatatan hibah langsung setelah kegiatan dilaksanakan pada tahun berjalan
 - b. Koordinasi antara PPK dan unit kerja pengelola hibah masih kurang efektif, sehingga terjadi miskomunikasi dalam pencatatan dalam laporan keuangan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada saat proses perencanaan, kepada semua unit kerja pelaksana kegiatan dan PPK disarankan:
 - a. Dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal atau rencana kerja yang telah disusun.
 - b. Agar dapat mempersiapkan lebih dini dalam menyusun legalisasi administrasi kegiatan antara lain berupa surat-surat keputusan dan data pendukung lainnya.

- c. Mempelajari tatacara/pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan, proses pencairan anggaran, pelaporan kegiatan/program yang akan dilaksanakan.
 - d. Pencatatan kegiatan ke dalam DIPA perlu lebih diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan register seperti MAK, kode kegiatan yang mengakibatkan perlu dilaksanakan revisi DIPA.
2. Untuk kelancaran proses pencairan, khususnya kepada pihak Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penerbit SPM serta para petugas pendukungnya agar dapat berkoordinasi dan memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada unit kerja yang mengusulkan (melalui PPK) jika terdapat hal-hal yang perlu segera diperbaiki/disempurnakan/diselesaikan dalam proses pengajuan usulan pencairan dana. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya keterlambatan proses pencairan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam proses pencairan menjadi lebih cepat, dan sesuai dengan rencana.
 3. Penyampaian laporan data realisasi penyerapan anggaran harus tetap konsisten berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setiap bulannya (sampai dengan akhir bulan).
 4. Perlu meningkatkan koordinasi dengan KPPN, Kanwil Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran dalam aplikasi SPAN sehingga pencairan dana tidak mengalami keterlambatan.
 5. Perlunya konsep perencanaan yang matang, jelas dan terukur dalam penggunaan anggaran. Sehingga penggunaan anggaran akan tepat sasaran dan indikator kinerja yang direncanakan akan tercapai.
 6. Untuk pengelola pinjaman dan hibah luar negeri perlu untuk melaksanakan tertib administrasi. Pada tahun 2014, hibah luar negeri sudah harus direncanakan sesuai dengan mekanisme penganggaran pemerintah dan dicatatkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat (*Jakarta Commitment*, 2009). Pencatatan atas pinjaman dan hibah luar negeri harus dilaksanakan dalam menjaga *quality spending* (kualitas belanja publik), walaupun nilai pinjaman dan hibah luar negeri relatif kecil dibandingkan dengan dana rupiah yang dikelola pemerintah.